



# RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KOTA SUNGAI PENUH**



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat tujuan dan sasaran beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 –2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021 –2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 –2026.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh. Dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh ini menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan dan implementasi pembangunan di Kota Sungai Penuh menuju Kota Sungai Penuh “ **Maju dan Berkeadilan** “. Selanjutnya untuk penyempurnaan, kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan.

Sungai Penuh, 13 Januari 2022

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN KOTA SUNGAI PENUH



**EDI JUARSA, SPt.MSi**

Pembina TK I

NIP. 19690417 200502 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 . Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat.....	11
2.1.1. Fungsi .....	11
2.1.2. Struktur .....	20
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	22
2.2.1. Kondisi Umum Pegawai .....	22
2.2.2. Aset / Modal.....	32
2.2.2.1 Unit Pelaksana Teknis Dinas.....	33
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	68

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **PERANGKAT DAERAH.....**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	72
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan	

Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	74
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota .....	
3.3.1. Telaahan kebijakan Provinsi.....	86
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis .....	90
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	94
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>104</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	104
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>108</b>
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .....	108
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>116</b>
6.1. Rencana Program Kegiatan dan pendanaan .....	116
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>156</b>
7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	156
<b>BAB VIII Penutup.....</b>	<b>193</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2020.....	32
Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana di BBI.....	34
Tabel 2.4. Bak Pembenihan di BBI.....	35
Tabel 2.5. Bangunan Gedung di BBI.....	35
Tabel 2.6. Potensi Pemotongan Ternak di Kota Sungai Penuh .....	37
Tabel 2.7. Potensi Pemotongan Ternak di Kota Sungai Penuh .....	37
Tabel t-c.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah *) Dinas Peternakan dan Perikanan.....	40
Tabel t-c.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	56
Tabel t-b.35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	70
Tabel t-c.25 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh.....	106
Tabel t-c.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	109
Tabel t-c.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh .....	117
Tabel t-c.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada .....	157
Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	161

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran I	Formulasi / Definisi Operasional Dalam Penghitungan Target Dan Capaian Indikator / Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan..... 161
Lampiran II	Formulasi / Definisi Operasional Dalam Penghitungan Target Dan Capaian Indikator / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan..... 164
Lampiran III	Formulasi / Definisi Operasional Dalam Penghitungan Target Dan Capaian Indikator / PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA ..... 185



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Peternakan dan Perikanan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan/atau kewenangan pembantuan/dekonsentrasi di Bidang Peternakan dan Perikanan

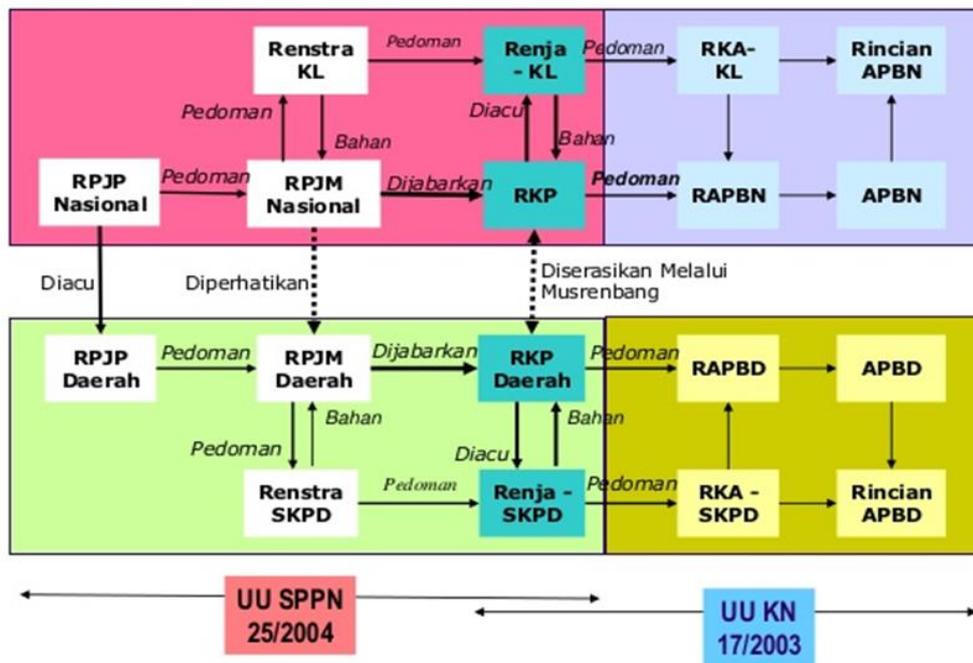
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh, Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang



Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2021-2026 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 yang dituangkan melalui program dan kegiatan, sebagaimana dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.



**Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra SKPD**

1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD.

2. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD juga harus



disertai dengan telaah Renstra Propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9898, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871).
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 1842);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
22. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Benih Dan Bibit Terak
23. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Sertifikasi Nomor control Veteriner unit Usaha Produk
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



25. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10).
28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);



33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
34. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 56).
35. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh Nomor ...../..... //..../Disnakkan/2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang digambarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh selama periode 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah dan acuan bagi Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pedoman penyusunan perencanaan tahunan (Rencana Kerja) Dinas Peternakan dan Perikanan
2. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Kota Sungai Penuh;

3. Menjamin keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi



Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sungai Penuh dan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 49 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh akibat Perubahan Tugas Pokok Fungsi dan Perubahan Bentuk Organisasi, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Peternakan dan Perikanan serta tugas pembantuan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh mempunyai fungsi sebagai berikut :

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan serta bidang perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

##### **2.1.2 Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;



- d. Pengoordinasian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan peternakan;
- e. Pengoordinasian pengembangan kawasan budidaya perikanan dan peternakan;
- f. Pembinaan umum dan bimbingan teknis dibidang perikanan dan peternakan;
- g. Pengelolaan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan usaha dibidang perikanan dan peternakan;
- h. Pengembangan teknologi dan penyebaran informasi bidang perikanan dan peternakan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan peternakan;
- j. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
- k. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat dan Bidang sebagai berikut :

#### **1. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dibidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Tugas Sekretariat* adalah :

- Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan;
- Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- Pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;



- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan; dan
- Penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian.

Sekretariat terdiri dari 2 sub bagian, yaitu : (1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2). Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Sub bagian sebagaimana yang dimaksud adalah dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan Perencanaan dan Keuangan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan bidang Peternakan dan Perikanan;
- Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas;
- Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)/LKJ-IP dan Laporan Tahunan dinas;
- Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang Peternakan dan Perikanan;
- Melaksanakan pengelolaan data statistik bidang Peternakan dan Perikanan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja dinas;
- Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
- Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan; dan



- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian;
- Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan keputakaan;
- Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang;
- Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;
- Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai;
- Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, rumahtangga, pengadaan dan kepegawaian;
- Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan; dan



- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. BIDANG PETERNAKAN

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggaraan Pembinaan Budidaya Peternakan dan Sarana dan Prasarana Peternakan. Fungsi Bidang Peternakan yaitu :

- Pelaksanaan pengelolaan pembibitan dan budidaya peternakan;
- Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana produksi dan Hijauan Makanan Ternak;
- Pelaksanaan pengelolaan penyebaran dan pengembangan peternakan;
- Pelaksanaan pengelolaan pelayanan usaha dan pengendalian usaha Peternakan dan Pengembangan Teknologi Peternakan;
- Pelaksanaan pengelolaan pemasaran hasil dan pembinaan kelembagaan usaha peternakan; dan
- Penyusunan laporan Bidang Peternakan.

Bidang Peternakan terdiri dari : (1). Seksi Budidaya Peternakan (2). Sarana dan Prasarana Peternakan. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Budidaya Peternakan mempunyai tugas :

- Memberikan petunjuk teknis budidaya peternakan;
- Menginventarisasi potensi wilayah budidaya dan pengembangan peternakan;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, peningkatan produksi dan populasi;
- Melaksanakan pendataan, inventarisasi, distribusi, redistribusi, serta pelaporan;
- Melaksanakan penataan, koordinasi dan konsultasi ke unit pembibitan peternakan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugasnya.



Seksi Bina Usaha dan Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas :

- Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang pengembangan usaha peternakan;
- Melaksanakan pengelolaan pemasaran hasil dan pembinaan kelembagaan usaha peternakan;
- Melakukan pengumpulan data informasi pasar, pemantauan harga dan pemasaran;
- Memfasilitasi pemupukan modal usaha dan perkreditan;
- Melaksanakan identifikasi, pengecekan kelayakan usaha dan pengelolaan perizinan usaha peternakan;
- Melakukan penilaian / perlombaan kelompok tani agribisnis peternakan dan kontes ternak; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- Menyusun dan mengembangkan kebutuhan sarana dan prasarana produksi peternakan;
- Memberikan bimbingan teknis pengadaan sarana dan prasarana peternakan;
- Melakukan identifikasi dan pengolahan sarana dan prasarana peternakan;
- Melakukann tata laksana dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **3. BIDANG PERIKANAN**

Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Budidaya, Bina Usaha, serta Sarana dan Prasarana Perikanan. Tugas dari Bidang Perikanan :

- Pelaksanaan pengelolaan pembenihan pembibitan dan budidaya perikanan;
- Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana produksi perikanan;



- Pelaksanaan pengelolaan penyebaran dan pengembangan perikanan;
- Pelaksanaan pengelolaan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan usaha dan permodalan usaha perikanan dan pengembangan teknologi perikanan;
- Melaksanakan pelaksanaan pengelolaan pemasaran hasil dan pembinaan kelembagaan usaha perikanan; dan
- Penyusunan laporan Bidang Perikanan.

Bidang Perikanan terdiri dari : (1). Seksi Budidaya Perikanan; (2) Seksi Bina Usaha dan Sarana dan Prasarana Perikanan.

Seksi Budidaya Perikanan mempunyai tugas :

- Memberikan petunjuk teknis budidaya perikanan;
- Menginventarisasi potensi wilayah budidaya dan pengembangan perikanan;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, peningkatan produksi dan populasi;
- Melaksanakan penataan, koordinasi dan konsultasi ke unit pembibitan / pembenihan perikanan; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Bina Usaha dan Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas :

- Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang pengembangan usaha perikanan;
- Melakukan identifikasi pengecekan kelayakan usaha pengelolaan perizinan bidang perikanan;
- Melakukan pengumpulan data informasi pasar, pemantauan harga dan pemasaran;
- Memfasilitasi pemupukan modal usaha dan perkreditan; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
- Menyusun dan mengembangkan kebutuhan sarana dan prasarana produksi perikanan;



- Memberikan bimbingan teknis pengadaan sarana dan prasarana perikanan;
- Melakukan identifikasi dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan;
- Melakukan tata laksana dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan dan;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang;

#### **4. BIDANG KESEHATAN HEWAN**

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengelolaan kesehatan hewan pengawasan obat hewan dan kesmavet.

Fungsi dari Bidang Kesehatan Hewan :

- Pelaksanaan pengelolaan pengamatan, penyidikan penyakit hewan dan ikan;
- Pelaksanaan pengelolaan pencegahan Penyakit hewan;
- Pelaksanaan pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner;
- Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan dan
- Penyusunan pelaporan Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan.

Bidang Kesehatan Hewan dan Hama Penyakit Ikan terdiri dari : (1). Seksi Kesehatan Hewan dan (2). Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kesmavet.

Seksi Kesehatan Hewan dan pengendalian hama dan penyakit ikan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengelolaan pengamatan, penyidikan penyakit hewan;
- Melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- Mempersiapkan tatalaksana pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Bahan Asal Hewan;
- Mempersiapkan petunjuk dan langkah-langkah pengendalian penyakit hewan;



- Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan;
- Menyusun laporan Seksi kesehatan Hewan; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
- Melaksanakan pengelolaan pengendalian hama penyakit ikan;
- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan;
- Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan;
- Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan mutu ikan konsumsi; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas

:

- Melaksanakan perlindungan hewan, pengawasan pemotongan hewan dan peredaran daging serta sanitasi lingkungan;
- Melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengujian hasil ternak berupa daging, telur, susu hasil olahannya;
- Melaksanakan pengawasan obat hewan dan pembinaan terhadap toko pengecer obat hewan;
- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data analisis kesehatan masyarakat veteriner;
- Menyusun laporan seksi pengawasan obat hewan dan kesmavet; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

## **5. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis ( **UPTD** ) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh terdiri dari 3 ( Tiga ) unit :

- UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Ternak
- UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
- UPTD Balai Benih Ikan



### 2.1.2 Struktur

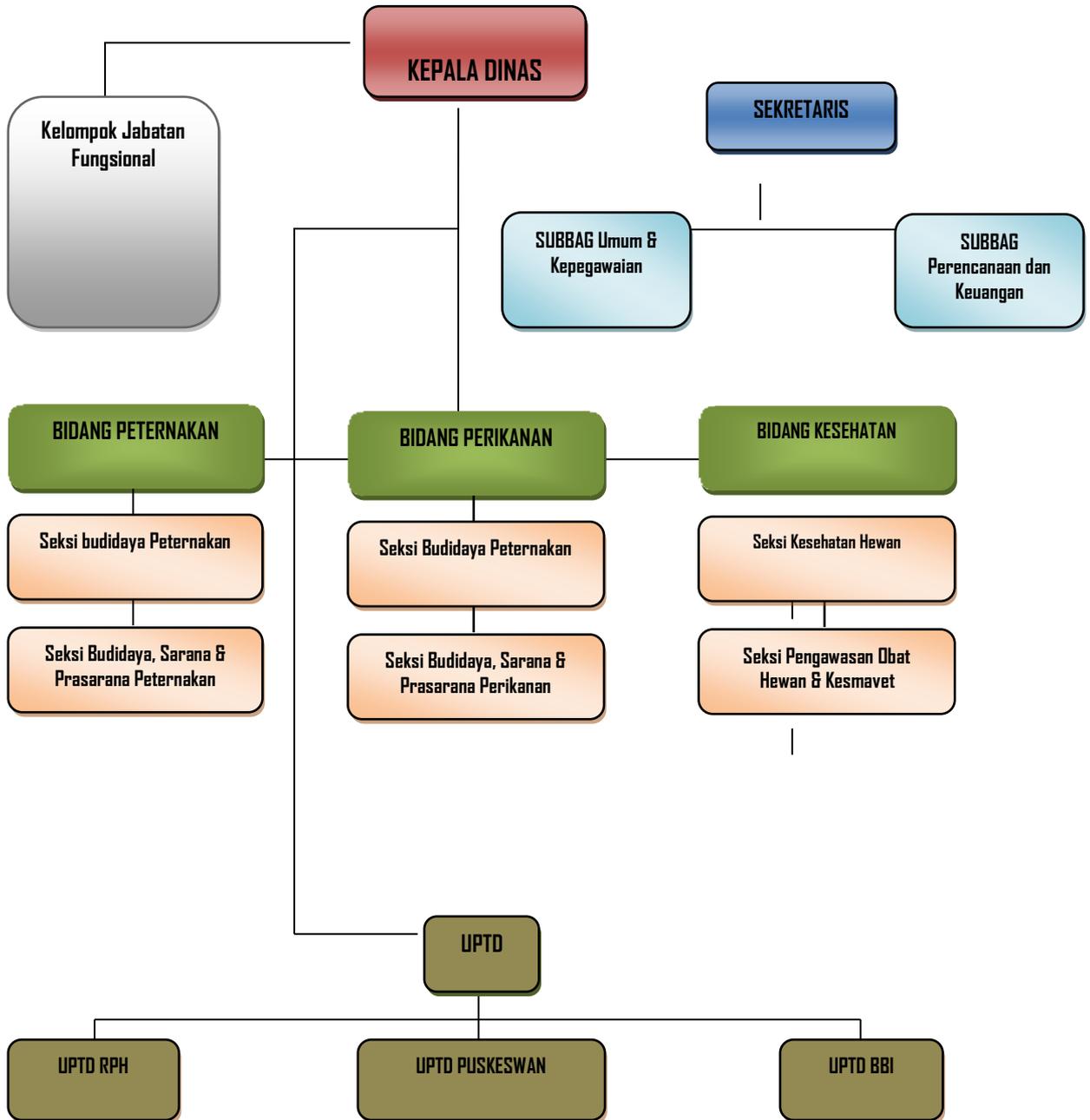
Berdasarkan Peraturan Daerah kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sungai Penuh. Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Adapun susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - Sub Bagian Program dan Penata usahaan keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Peternakan, membawahi :
  - Seksi Budidaya Peternakan;
  - Seksi Bina Usaha Peternakan dan Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Perikanan, membawahi :
  - Seksi Budidaya Perikanan;
  - Seksi Bina usaha dan SaranaPrasarana Perikanan.
5. Bidang Kesehatan Hewan dan Hama Penyakit Ikan, membawahi :
  - Seksi Kesehatan HewanPengendalian Hama dan Penyakit Ikan;
  - Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kesmavet;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), membawahi :
  - UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
  - UPTD Puskesmas;
  - UPTD Balai Benih Ikan (BBI).
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Susunan Organisaasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, disajikan dalam Gambar 2



Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh





## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh pada tahun 2021 sebanyak 70 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, Tenaga Honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel.1 berikut.

**Tabel .1 Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh**

NO	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	30	42,86
2	CPNS	1	1,43
3	PENYULUH PERIKANAN	8	11,43
4	TENAGA Magang	31	44,28
	<b>JUMLAH.....</b>	<b>70</b>	<b>100</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri (44.28%) yaitu tenaga Kontrak/honorer.

#### a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 19 orang.

Dari 39 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat: 10,26% pegawai yang menduduki Eselon III, sedangkan yang menduduki Eselon IV sebanyak 35,90%, dan Eselon II sebanyak 2,56%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel.2 dibawah ini.



**Tabel .2 Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan yang menduduki Jabatan dan Staf.**

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	2,56
2.	Eselon III	4	10,26
3.	Eselon IV	14	35,90
4.	Staf/Pelaksana	12	30,77
5	Fungsional Perikanan	8	20,51
	<b>JUMLAH.....</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

**b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pangkat**

Dari 40 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat: 10% pegawai yang golongan III, sedangkan yang golongan IV sebanyak 25%, dan golongan II sebanyak 2.5%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel.3 dibawah ini

**Tabel 3 : Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan Pangkat dan golongan**

No	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	11	35,48
2.	III	19	61,29
3.	II	1	3,23
	<b>JUMLAH.....</b>	<b>31</b>	<b>100</b>

**c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**



Tabel 4 Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1	Strata-2 (S2)	10	32,26
2	Dokter Hewan	1	3,23
3	Strata-1 (S1)	17	54,84
4	Sarjana Muda (D3)	2	6,45
5	SLTA / SMK	1	3,23
	<b>Jumlah.....</b>	<b>31</b>	<b>100</b>

Dari tabel dapat dilihat sebagian besar PNS yang ada memiliki latar belakang pendidikan sarjana 30 orang. Kondisi ini cukup ideal untuk mendukung tugas pokok untuk mendukung Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh.

#### d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Komposisi jenis kesarjanaan/ disiplin ilmu dari tingkat pendidikan pegawai adalah : tingkat strata-2 (22,22%) dengan jenis disiplin ilmu, Strata-1 (52,78%), sarjana Muda/DIII (11,11.%).

Tabel 5 : Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu

No	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	MAGISTER	<b>11</b>
	1. Manajemen	11
	2. Peternakan	-
	3. Administrasi	-
B.	SARJANA	<b>16</b>
	1. Peternakan	2
	2. Pertanian	5



3.	Dokter Hewan	1
4.	Produksi Ternak	1
5.	Ilmu Kelautan	1
6.	Manajemen Sumber Daya Perairan	1
7.	Ekonomi Pembangunan	3
8.	Manajemen	2
9.	Administrasi Negara	1
	<b>SARJANA MUDA</b>	<b>2</b>
	1. Peternakan	2
D.	SLTA/SMK	1
	<b>Jumlah.....</b>	<b>31</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara garis besar variasi kedisiplinan ilmu pegawai yang memiliki pendidikan tinggi dapat dibagi 3 : (1) disiplin teknis peternakan dan perikanan sebanyak %, 61,11(2) disiplin ilmu manajemen dan ilmu pemerintahan sebanyak 38,88 %, dan (3) disiplin ilmu lainnya sebanyak 11,11 %. Sumberdaya manusia dengan Kompetensi keilmuan yang ada tersebut akan menjadikan Dinas Peternakan dan Perikanan dapat melaksanakan fungsi teknis dan tata laksana organisasinya dengan lebih berkualitas.

#### **e. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan**

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas peternakan dan perikanan, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 36 Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat 12,50 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM II dan Diklat PIM III atau sejenisnya ,sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 75%.Selengkapnya dapat dilihat pada tabel.6



**Tabel.6 Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan yang mengikuti Penjenjangan**

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Diklat Pim Tk II	1	12,50
2.	SPAMA /PIM III	1	12,50
3.	AD/ PIM IV	6	75
	<b>Jumlah.....</b>	<b>8</b>	<b>100</b>

Budidaya peternakan tersebar diseluruh kecamatan dalam kota Sungai Penuh, arahan pengembangan peternakan ini dilakukan di setiap kecamatan, rencana pengembangan budidaya peternakan diarahkan menyebar diseluruh kecamatan dalam kota Sungai penuh melalui :

- Penggunaan lahan secara terpadu.
- Pengelolaan pemasaran hasil ternak secara lebih baik terutama untuk pemasaran lokal dan regional.

**Perkembangan Populasi , produksi dan Konsumsi Ternak Tahun 2016-2020**

Berdasarkan Tabel.7 kenaikan populasi rata-rata untuk ternak besar yaitu : ternak kambing dan domba mengalami kenaikan yang signifikan ini dikarenakan masyarakat lebih senang memelihara kambing dan domba dimana perawatannya tidak membutuhkan dana yang besar.

**Tabel.7 Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas tahun 2016 – 2020**

NO	JENIS TERNAK	Th 2016 (ekor)	Th 2017 (ekor)	Th 2018 (ekor)	Th 2019 (ekor)	Th 2020 (ekor)
1	Sapi	4,614	4,614	4,160	4,205	3.644
2	Kerbau	365	375	311	364	360
3	Kuda	57	59	61	76	77
5	Kambing	14,077	14,077	11833	12,787	15.437



6	Domba	5,939	5,939	2,469	2,540	5.766
7	Ayam Buras	36.984	37.281	45.326	49.551	50.543
8	Ayam Petelur	33.365	41.385	49.149	50.649	51.662
9	Ayam Pedaging	36.697	37.281	39.171	46.292	47.552
10	Itik	35.906	36.858	42.343	43.043	43.904

\*Keadaan sampai dengan Desember 2020

**Tabel.8 Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Tahun 2016 – 2021**

NO	JENIS KOMODITAS	Th 2016 (kg)	Th 2017 (kg)	Th 2018 (kg)	Th 2019 (kg)	Th 2020 (kg)
1	Daging sapi	418,03	448,32	504,11	507,6	821,61
2	Daging Kerbau	102,67	109,50	100,21	121,57	
3	Daging	27,94	27,45	29,75	47,7	
4	Kambing Daging domba	10,76	10,06	10,83	11,8	

**A. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) Tahun 2016 – 2021**

Tujuan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) adalah meningkatkan Mutu Genetik Ternak dan Meningkatkan Populasi ternak.

**Tabel.9 Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dari tahun 2016-2020**

No	Wilayah	Pelaksanaan IB					Keberhasilan IB				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hamparan Rawang	390	199	429	381	431	232	153	233	291	307
2.	Sungai Penuh	189	200	229	175	233	170	179	178	154	181
3.	Kumun Debai	87	73	6	40	45	6	9	6	0	59
4.	Pondok Tinggi	29	10	5	29	31	5	10	5	0	30



5.	Pesisir Bukit dan Koto Baru	58	94	77	91	95	11	35	10	36	47
6.	Tanah Kampung	32	132	54	91	125	21	48	20	50	75
	Jumlah.....	785	708	800	807	960	445	434	452	531	699

Dari tabel.9 pelaksanaan IB dari tahun 2016-2020 keberhasilannya 63,07%

## B. Perkembangan Pelayanan Kesehatan Hewan

Tujuan pelayanan Kesehatan Hewan untuk mewujudkan hewan/ternak yang sehat dan ketersediaan bahan asal hewan (BAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Program pelayanan kesehatan hewan, terutama kasus-kasus penyakit zoonosis di Kota Sungai Penuh, khususnya gigitan anjing selama lima tahun, terjadi penurunan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel.10 Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak Tahun 2016-2020**

NAMA KEGIATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
<b><u>VAKSINASI</u></b>					
- Rabies	2000 Ekor	2500 Ekor	3200 Ekor	3500 Ekor	2500 Ekor
- SE	1000 Ekor	1500 Ekor	2650 Ekor	2500 Ekor	1500 Ekor
ELIMINASI ANJING LIAR	102 Ekor	120 Ekor	142 Ekor	298 Ekor	-
PENGOBATAN TERNAK BESAR DAN TERNAK KECIL	1000 Ekor	1500 Ekor	1670 Ekor	1500 Ekor	200 Ekor



<u>PENGUJIAN SAMPEL</u>					
- Bahan Asal Ternak	5 Sampel	5 Sampel	14 Sampel	10 Sampel	5 Sampel
- Sampel Ternak	100 Sampel	150 Sampel	200 Sampel	164 Sampel	38 Sampel
- Ikan	10 Sampel	10 Sampel	15 Sampel	10 Sampel	10 Sampel

### C. Perkembangan Perikanan

Kawasan untuk perikanan tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, arahan pengembangan kawasan dilakukan disetiap kecamatan untuk memanfaatkan sungai batang merao sebagai areal pengembangan budidaya perikanan darat serta balai benih ikan (BBI) dalam Kota Sungai Penuh untuk menunjang pengembangan budidaya perikanan. Perkembangan perikanan dalam Kota Sungai Penuh selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dibawah ini.

#### 1. Produksi Perikanan

Kota Sungai Penuh memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya air payau (tambak), perikanan budidayadarat (kolam), dan perikanan tangkap di perairan umum. Produksi perikanan tangkap di Kota Sungai Penuh berfluktuasi dimana pada tahun 2021 produksinya mencapai **224,36** ton. Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap dilihat pada tabel 17 dibawah ini :

**Tabel.11 Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap dalam Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2021**

NO	PRODUKSI	JUMLAH (TON)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Budidaya	210	201,86	64,127	202,261	224,361
2	Tangkap	107,90	109,80	115,036	204,34	234,646



3.	Unit Pemijahan Rakyat(UPR)		150	160,350	422,700	2,103,210
4.	Unit Pengolahan Perikanan (UPI)	72	72	49,33	62,147	79,320
5	Rumah Tangga Perikanan (RTP)			1069	1119	1469
6	PRODUKSI TOTAL PERIKANAN	317,90	311,66	179,163	406,60	459,007

a. **Kelembagaan**

**Tabel.12 Kelembagaan yang di miliki Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh**

No	Kelembagaan	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan	1 unit	Hibah Pemda Kerinci
2.	Kantor UPTD BBI Lokal	1 unit	
3.	Kantor UPTD RPH	1 unit	Hibah Pemda Kerinci
4.	Kantor UPTD Pembibitan ternak dan HMT	1 unit	
5.	Kantor UPTD Puskesmas	1 unit	
6.	Pasar Ternak Sungai Sirah	1 unit	Dalam Proses
7.	Pos Inseminasi Buatan (IB)	1 unit	Rusak Berat

b. **Evaluasi Indikator Kinerja Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016-2020**

Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh merupakan salah satu unit kerja otonomi di bawah Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Dukungan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)dari tahun 2016-2020, seperti pada tabel.18 dan tabel. 19



**Tabel.13 Target dan Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Pendapatan:</b>					
	-Target	65.798.000	88.000.000	88.186.070	88.186.070	14.630.250
	-Realisasi	5.916.000	23.678.500	19.096.500	29.260.500	16.450.000
	-Prosentase	8,99	26,91	21,65	33,18	112,44
2	<b>Belanja</b>					
	<b>Langsung :</b>					
	-Target		3.323.700.000	2.926.591.000	4.972.645.772	926.792.169,73
	-Realisasi		3.128.458.642	2.805.977.011	4.854.383.693	798.183.500,73
	-Prosentase		94,13	95,88	97,62	86,12
3	<b>Belanja tidak langsung:</b>					
	-Target		2.437.990.255	1.987.588.759	3.864.624.703,15	3.202.450.531,00
	-Realisasi		2.231.725.084	1.905.348.906	3.736.767.399,00	3.038.207.507,00
	-Prosentase		91,54%	95,86	96,69	94,87

**Tabel.14 Target dan Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)</b>					
	-Target	2.170.000.080	-	2.028.409.000	2.713.083.996	-
	-Realisasi	1.837.158.407	-	2.011.134.000	2.637.575.261	-
	-Persentase	84,66%	-	99,15%	96,97%	-



Dari keterangan tabel.14 dapat kita lihat pada perkembangan 5 tahun terakhir bahwa hampir setiap tahunnya mendapatkan dan DAK namun pada tahun 2017 dan 2020 tidak mendapatkan anggaran DAK di karenakan fokus pembiayaan dana DAK perikanan dan Peternakan pada tahun tersebut DAK penugasan

### **Pelayanan**

Jenis Pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Izin Tempat Usaha Peternakan (Rekomendasi)
2. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan
3. Pelayanan Kesehatan Hewan (pengobatan dan Vaksinasi)
4. Pelayanan Rumah Potong Hewan
5. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
6. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)
7. Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (ATR)

### **2.2.2 Aset / Modal**

Kota Sungai Penuh memiliki berbagai aset yang dapat mendukung berkembangnya potensi peternakan dan perikanan. Berikut ini adalah berbagai aset yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh pada Tahun 2021.

**Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Lokasi</b>
1.	Kantor Dinas	Jl. Jl. Sri Soedewi Maschun Sofwan. SH No 99 Sungai Bungkal
2.	Balai Benih Ikan (BBI)	Jl. Desa Talang Lindung
3.	Pasar Ikan LOSIBA	Pasar Tanjung Bajure
4.	Balai Inseminasi Buatan (BIB)	Desa Paling Serumpun Kec. Hamparan Rawang



5.	Rumah Potong Hewan (RPH) Sungai Penuh	Jl. Desa Koto Dua Sungai Liuk
6.	Pasar Ternak Sungai Sirah	Jl. Desa Koto Dua Sungai Liuk
7.	Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	Desa Talang Lindung Dusun Renah Jambu Tupai
8.	UPT Perbibitan Ternak (dalam Proses pembentukan)	Desa Talang Lindung

### 2.2.2.1 Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### A. UPTD Puskeswan

- Potensi UPTD

UPTD Balai Puskeswan sebagai salah satu unit pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan berperan dalam:

1. Penyedia straw sapi dan domba
2. Pelayanan teknis inseminasi buatan dan kesehatan hewan
3. Pelayanan kesehatan hewan baik ternak pemerintah maupun ternaknon pemerintah
4. Pelayanan laboratorium kesehatan hewan secara aktif, semi aktif danpasif
5. Penanggulangan, pengendalian, pencegahan penyakit hewan menular sehingga mengurangi kasus penyakit menular dan tidak menular Sarana Puskeswan dan Laboratorium terdiri dari :
  1. Luas lahan : 2200 m<sup>2</sup> (Puskeswan)
  2. 1 unit gedung perkantoran (Ruang pertemuan dan administrasi) danlaboratorium berikut ruang periksa.
  3. Sepeda motor
  4. Peralatan medis
  5. Peralatan Laboratorium



6. Obat-obatan
7. Sumberdaya Manusia :
  - a. Kepala UPTD
  - b. Kasubbag TU
  - c. Staf Fungsional Umum
  - d. Fungsional :
    - Medik Veteriner
    - Paramedik Veteriner

#### **B. UPTD Balai Benih Ikan**

- Potensi UPTD
1. Luasan Lahan Budidaya Ikan :
    - Luas lahan 0,5 Ha
    - Cekdam 0.03 Ha
  2. Sarana dan prasarana
    - a :Kolam

**Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana di BBI**

No.	Macam Kolam	Jumlah (buah)	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	Kolam Induk Jantan	1	48
2.	Kolam Induk Betina	1	
3.	Kolam Pemijahan	1	
4.	Kolam Pembesaran	1	
5.	Kolam Penampungan Benih	1	



6.	Kolam Pembuangan	1	
7.	Kolam Pendederan	1	
8.	Kolam Pendederan Larva Ikan Nila	1	
9.	Kolam Penampung Benih	1	
10.	Kolam Calon Induk	1	
JUMLAH		10	

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan

**Tabel 2.4. Bak Pembenihan di BBI**

No.	Macam Kolam	Jumlah Kolam (buah)	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	Bak Pemijahan Sistem Hapa (H-I)	-	-
2.	Bak Sortasi Benih	-	-
3.	Bak Treatment (H-I)	-	-
4.	Bak Penampungan/Penjualan	-	-
5.	Benih	-	-
6.	Bak Pendederan Intensif	-	-
7.	Bak Kultur Pakan Alami	-	-
	Bak Pemijahan Ikan Mas	-	-
JUMLAH		-	-

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan

**Tabel 2.5. Bangunan Gedung di BBI**

No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	Kantor	-	-
2.	Gedung Serba Guna	-	-



3.	Laboratorium :		
	a. Basah (Hatchery I)	-	-
	b. Kering	-	-
4.	Hatchery II	-	-
5.	Loket dan Gudang Peralatan	-	-
6.	Gudang Traktor	-	-
7.	Gudang Peralatan	1	-
8.	Gudang Pupuk	-	-
9.	Mess Operator -	-	-
10.	Rumah Penjaga -	1	-
11.	Hatchery III	-	-
	JUMLAH	2	

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan

### 3. Kepegawaian :

- Kepala UPTD
- Staf fungsional umum : 1 orang

### C. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Ternak

#### - Potensi UPTD

Secara umum UPTD RPH merupakan UPTD yang bertugas dalam pelaksanaan teknis dan operasional di bidang pengelolaan, pengawasan dan pemeriksaan ternak sebelum dan sesudah pemotongan di RPH pemerintah maupun swasta sehingga dapat dihasilkan produk daging yang Aman, Sehat, utuh, Halal (ASUH).

#### a) Lokasi dan Potensi Pemotongan



**Tabel 2.6. Potensi pemotongan ternak di Kota Sungai Penuh**

No	Nama RPH	Status kepemilikan	Alamat	Potensi pemotongan (Ekor/hari)
1	RPH Sungai Penuh	Pemerintah	Desa Koto Dua Sungai Liuk	4
		<b>Jumlah</b>		4

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan

b) Sumber daya manusia

- Kepala UPTD
- Staf Fungsional Umum : 7 orang

- Lokasi dan Potensi Pasar Ternak Sungai Sirah

**Tabel 2.7. Potensi pemotongan ternak di Kota Sungai Penuh**

No	Nama Pasar Ternak	Status kepemilikan	Alamat	Rata-Rata Penjualan(Ekor /mgg)
1	Pasar Ternak Sungai Sirah	Pemerintah	Desa Koto Dua Sungai Liuk	4
		<b>Jumlah</b>		4

Lokasi Pasar ternak dengan luas lahan 0,5 Ha yang merupakan Hibah dari pemerintah Kabupaten kerinci dengan aksesnya sangat layak untuk pusat perdagangan ternak yang merupakan sumber pasok ternak di Rumah potong Hewan Potensi dengan akses jalan umum yang memadai sangat mudah melakukan transaksi jual beli. Mengingat besarnya kebutuhan dan pasokan ternak dari transaksi penjualan ternak setiap minggunya sehingga peluang perdangan dalam bentuk pasar rakyat juga sangat layak dimana masyarakat



sekitar bisa menjual hasil dalam bentuk hasil pertanian dan terjadi transaksi jual beli di kawasan tersebut sehingga dampak keberadaan lokasi pasar ternak dapat bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

### 2.2.2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh belum cukup memadai, dikarenakan belum adanya bangunan kantor sendiri masih menyewa tempat untuk perkantoran.

**Tabel 15. Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan**

No	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1.	Kendaraan Roda empat (4)	4	unit
2.	Kendaraan Roda Tiga (3)	2	Unit
3.	Kendaraan roda dua (2)	14	unit
4.	Mesin Pompa	8	Unit
5.	Portable Generating Set	1	unit
6.	Mesin Mesin Pembuat Pellet	3	Unit
7.	Mesin Ketik manual portable	1	Unit
8.	Tang Aplikator ear tag	2	Unit
9.	Kursi Lipat	69	Buah
10	Filling besi/metal	10	unit
11	Mesin Penetas Telur	2	unit
12	Brand kas	1	unit
13	Lemari kaca	2	unit
14	Lemari Kayu	6	unit
15	Papan Nama Instansi	1	buah
16	Meja periksa pasien	1	unit
17	Kursi tamu	2	unit
11	Meja komputer	1	unit



12	Meja Biro	1	unit
13	Lemari es	1	unit
14	Televisi	1	unit
15	Sound sytem	1	unit
16	Handycam	1	unit
17	Camera digital	4	unit
18	Komputer P.C	12	unit
19	Laptop	20	unit
20	Line printer	3	unit
21	Hard disk	1	unit
22	Printer	22	unit
23	Meja kerja eselon III	4	unit
24	Kursi kerja eselon II	1	unit
25	Kursi kerja eselon III	4	unit
26	Kursi kerja eselon IV	14	unit
27	Lemari arsip utk arsip dinamis	4	unit
28	Proyektor	1	unit
29	Handy talky	1	unit
30	Facsimille	1	unit
31	Parabola	1	set
32	Alat kedokteran bedah	1	unit
33	Alat pengukur kadar air	1	unit
34	Alat Lab. Kedokteran	2	unit
35	Mikroskop	1	unit
36	Modem	1	unit
37	UPS	2	unit

### **2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.3.1. Capaian Berdasarkan Indikator Sasaran RENSTRA 2011-2016.  
Berdasarkan indikator sasaran pada renstra tahun 2011-2016 maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan selama 5 tahun masa pembangunan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



TABEL TC. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan  
dan Perikanan Kota Sungai Penuh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Peningkatan Produksi perikanan <u>Jumlah produksi ikan (ton)</u> Target Daerah (ton)	-	Jumlah Produksi ikan  Pertahun		175,1	188,57	241,97	279,00	23,00	175,1	188,57	241,97	279,00	23,00	70,04	68,57	78,56	78,59	62,16
2	Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat/ Kg/Kapita/Tahun <u>Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)</u>	-	Jumlah Penduduk yang konsumsi ikan		26 kg	26 kg	27 kg	27 kg	27 kg	26 kg	26 kg	27 kg	27 kg	27 kg	100	100	100	100	100



	Target Daerah (ton)																		
3	Cakupan Bina Kelompok Tani Perikanan (klpk)	-	Jumlah Kelompok Tani yang mendapat bantuan	32	13	48	28	41	32	13	48	28	41	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Bina Kelompok tani peternak <u>Jumlah kelompok peternak bantuan pemda thn</u> Jumlah Kelompok peternak (klpk)	-	Jumlah Kelompok Tani peternak yg mendapat Bantuan	0	3	26	25	31	0	3	26	25	31	100	100	100	100	100	
5	Produksi daging ternak (ton)	-	Jumlah produksi daging/tahun	436,34	679,09	703,77	772,11	821,61	436,34	679,09	703,77	772,11	821,61	109,63%	168,26	171,90	185,96	195,16	
6	Eliminasi anjing liar (ekor)	-	Jumlah populasi anjing liar	102	120	142	298	250	102	120	142	298	250	100%	60	56,80	119,20	83,33	



7	Meningkatnya kekebalan dan kesehatan ternak	Jumlah Vaksin SE	1000	1500	2650	2500	1500	1000	1500	2650	2500	1500	62,70	75	120,4	108,7	62,50	
		Jumlah Vaksin Rabies	2000	2500	3200	3500	2500	2000	2500	3200	3500	2500	107,1	83,33	96,97	102,9	71,43	
		Jumlah Pengobatan																
		- Sapi	270	310	325	325	325	270	310	325	325	325	108	114,8	108,3	108,3	109,6	
		-Kerbau	27	35	55	55	60	27	35	55	55	60	0	112,5	116,6	110	110	120
		-Kuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,1	0	0	0	0
		-Kambing	85	150	150	150	170	85	150	150	150	170	9	100	100	100	100	100
		-Unggas	1300	1300	1400	1500	1750	1300	1300	1400	1500	0	130	108,3	108,3	107,6	107,1	116,6
		- Anjing/kucing	200	365	360	375	425	200	365	360	375	425	3	163,9	121,6	112,5	107,1	121,4



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Perikanan selama tahun 2016-2021 berpedoman pada RENSTRA Tahun 2016-2021. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas peternakan dan Perikanan Tahun 2016-2021 dapat tercapai dengan baik.

Kinerja pelayanan dinas dilihat dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan, secara umum capaian kinerja Dinas Peternakan dan perikanan telah memenuhi target selama 5 (lima ) tahun berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Secara umum capaian seluruh indikator pada sasaran Meningkatnya Populasi dan Produksi Peternakan di Kota Sungai Penuh dapat dicapai sesuai dengan target dengan rata-rata tingkat capaian lebih dari 100%, dengan perincian sebagai berikut:

a.Peningkatan populasi sapi

Peningkatan populasi sapi pada tahun 2020 sebesar 39.241 ekor atau 131,90% dibandingkan target sebesar 29.750 ekor. Apabila dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 37.025 ekor meningkat sebesar 5,98%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebanyak 32.830 ekormeningkat 19,53%. Apabila dibandingkan dengan capaian peningkatan populasi sapi tahun 2015 sebesar 29.697 ekor menunjukkan kenaikan sebesar 32,14% dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 29.115 ekor menunjukkan kenaikan 34,78%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting dan Gangguan Reproduksi dari sumber dana APBN pada tahun berkenaan sehingga meningkatkan angka kelahiran dan berbanding lurus pada peningkatan populasi ternak sapi.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2013-2018) sebanyak 29.750ekor, maka telah tercapai 131,90%;



b. Angka kelahiran dan Persentase Pemanfaatan Teknologi perbibitan Ternak Melalui Insinminasi Buatan

Dari capaian Akhir periode RPJM pada peningkatan populasi sapi potong setiap tahunnya dari awal RPJMD tahun 2016 dan capaian realisasi tahun 2018 s/d 2020 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan program Sapi Induk Wajib Bunting dan Program SIKOMANDAN 2020 Sapi Kerbau andalan Dalam Negeri. dari sumber dana APBN pada tahun berkenaan sehingga meningkatkan angka kelahiran dan berbanding lurus pada peningkatan populasi ternak sapi hal ini juga sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan Populasi ternak sapi. Tahun 2020 untuk kota sungai penuh hingga bulan Desember 2020 realisasi IB, PKB dan Kelahiran sudah mencapai 95 % dari Target yang ditetapkan oleh Propinsi Jambi untuk Kota Sungai Penuh. Tercapainya target peningkatan populasi dari ternak sapi ini dikarenakan adanya jumlah kelahiran dari ternak sapi sebanyak 812 ekor (Program SIKOMANDAN) sehingga memacu perkembangan dari jumlah populasi ternak sapi.

Perkembangan ternak ruminansia besar terjadi peningkatan selama tahun 2020, jumlah populasi Ruminansia besar 4.914 Ekor dengan jumlah sapi 4.559 ekor dan jumlah ternak kerbau 355 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 709 ekor. Dengan rincian peningkatan ternak sapi sebanyak 189, dengan populasi tahun 2019 sebanyak 4205 ekor menjadi 4.559 ekor pada tahun 2020 dan ternak kerbau meningkat sebanyak 53 ekor dari populasi tahun 2019 sebanyak 364 ekor menjadi 355 ekor.

	<b>Jenis Ternak</b>	<b>Stok awal Tahun</b>	<b>Lahir</b>	<b>Datang Dari Luar</b>	<b>Dipotong</b>	<b>Pindah Keluar Kabupaten</b>	<b>Mati/ Hilang</b>	<b>Stok Akhir Tahun</b>
	Sapi/Cow	4.205	933	1652	1.658	521	52	4.559
	Kerbau/ Buffalo	364	27	109	109	3	6	355
	Kuda/ Horse	71	0	5	0	2	0	70

Perkembangan ternak ruminansia besar berdasarkan table diatas dari



awal tahun 2020 sampai pada akhir 2020 terjadi peningkatan, peningkatan disebabkan karena adanya Program / kegiatan SIKOMANDAN Dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Petanian Republik Indonesia Tahun 2020.

Sedangkan pada Ternak Kerbau dari capaian data dapat dilihat pada peningkatan populasi sapi potong setiap tahunnya dari awal RPJMD tahun 2016 dan capaian realisasi tahun 2019 s/d 2020 terlihat capaian yang di lakukan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. tidak tercapainya target tersebut dikarnakan karena pemotongan dan penjualan yang tidak terkendali. Namun demikian kendati tidak tercapainya target yang ada realisasi pupulasi ternak kerbau mengalami peningkatan di setiap tahunnya dari awal RPJMD 2016 hingga 2020, target tidak tercapai hal ini disebabkan karena minat dari peternak dalam membudidayakan ternak kerbau yang rendah, kecenderungan dari peternak lebih memilih ternak sapi Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (2016-2021) sebesar 70% maka pada tahun 2020 angka kelahiran anak Sapi melalui Inseminasi Buatan tercapai 111,43%;

TABEL PERKEMBANGAN RUMINANSIA KECIL TAHUN 2020

NO	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)									
		TK	KD	SP	PT	SB	HR	PS	KB	STOK AWAL 2020	JUMLAH
1	kambing/ Goat	1998	1956	908	589	708	1490	1072	660	11.833	9.381
2	Domba/S heep	784	521	301	171	204	349	398	194	2.469	2.922

Perkembangan ternak ruminansia kecil berdasarkan table diatas, terjadi penurunan ternak kambing selama tahun 2020 sebanyak 2.452 ekor dengan



jumlah stok awal kambing 11.833 ekor menjadi 9.381 ekor. Penurunan ternak kambing dominan terjadi di tiga kecamatan yaitu di kecamatan Tanah Kampung, Kumun debai dan Hamparan Rawang. Sedangkan ternak domba juga terjadi peningkatan selama tahun 2020 sebanyak 71 ekor, dari 2540 ekor menjadi 2922 ekor. Peningkatan dominan hanya terjadi di Kecamatan Tanah Kampung. Penyebab terjadinya peningkatan ternak ruminansia kecil di atas disebabkan pemeliharaan ternak kambing lebih cepat menghasilkan anak dan juga pemeliharaannya lebih simpel serta tidak memerlukan pakan yang terlalu banyak selain itu Tercapainya target untuk ternak Kambing salah satunya adalah karena adanya motivasi dan stimulan yang diberikan oleh Pemerintah berupa bantuan ternak kambing sehingga memicu peternak untuk membudidayakan ternak kambing selain itu karena ternak kambing termasuk ternak ruminansia yang mudah di budidayakan dengan rasio kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan ternak sapi. Sedangkan pada ternak Domba Target yang ditentukan untuk tahun 2020 sebesar 2.469 ekor dan realisasi sebesar 2.540 ekor. tercapainya target dari peningkatan populasi ternak domba, karena adanya tingkat kelahir yang meningkat dan karena proses penjualan yang mudah sehingga memicu minat peternak untuk membudidayakannya.

#### **a. Peningkatan Produksi Daging Sapi**

Peningkatan Produksi daging sapi dari tahun 2019 mengalami Peningkatan sebesar 55,79 dari jumlah produksi daging pada tahun 2019 sebesar 448,32 menjadi 504,11 pada tahun 2020 hal ini tentunya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 464,12 ini tentunya bergaris lurus terhadap pencapaian Populasi ternak sapi dikarenakan selain pencapaian Program SIKOMANDAN dan faktor lainnya adalah dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pasokan daging beku dan ini menambah jumlah produksi daging sapi dengan pasokan daging beku rata-rata hampir setiap bulannya sebesar 7000 Kg/Bulan.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (2016-2021) tercapai 100,76% dari target yang ditetapkan sebesar 176,65 kg/ekor.



### **b. Peningkatan Produksi Daging Kerbau**

Peningkatan Produksi daging Kerbau juga demikian mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 109,50 menjadi 100,21 pada tahun 2020 hal ini tentunya bergaris lurus terhadap pencapaian Populasi ternak juga mengalami penurunan dikarenakan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pasokan daging beku sehingga mengakibatkan penurunan dari sisi pemotongan ternak.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (2016-2021) tercapai 100,76% dari target yang ditetapkan sebesar 176,65 kg/ekor.

### **c. Peningkatan Produksi Daging Kambing dan Domba**

Peningkatan Produksi daging ternak ruminasia kecil (kambing dan domba juga demikian mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 27,45 menjadi 29,75 pada tahun 2020 hal ini tentunya bergaris lurus terhadap pencapaian Populasi ternak kambing dan domba juga mengalami penurunan dikarenakan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pasokan daging beku sehingga mengakibatkan penurunan dari sisi pemotongan ternak.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (2016-2021) tercapai 100,76% dari target yang ditetapkan sebesar 176,65 kg/ekor.

### **d. Jumlah Pemanfaatan Teknologi perbenihan ikan**

Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian	% Pencapaian Terhadap target renstra
	2018	2019	2020		
Jumlah Pemanfaatan Teknologi perbenihan ikan	90.000	85.000	2.103.210	42,5 %	220.000
Produksi perikanan budidaya (Target/Realisasi)	64.00	167.063	224.361	267 %	62,46 %
Jumlah Produk Olahan Perikanan	6	7	7	100	10



Peningkatan produksi perikanan. Adapun target capaian pada tahun 2020 sebesar 200.000 ekor benih ikan lele dan nila dengan realisasi sebesar 2.103.210 benih nila dan lele dengan persentase 1000 % hal ini disebabkan karena Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui Penyuluh Perikanan dan Bantuan Kepada UPR dan POKDAKKAN berupa Calon Induk Ikan yang langsung diberikan Baik itu dari pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi Jambi (Dinas KKP) dan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT BBAT Sungai Gelam

Untuk mencapai target kegiatan yang telah ditetapkan yaitu 250.000 ekor benih ikan lele dan nila, maka kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemijahan baik secara alami maupun dengan bantuan penambahan hormon. Pemijahan alami terjadi pada ikan nila, yang mana terhadap benih dihasilkan dilakukan pendederan ke akuarium minimal 1 minggu sekali, adapun angka kematian pada saat ini adalah sekitar 10%, setelah itu dilaksanakan pendederan berikutnya yaitu dari akuarium ke kolam yang bertujuan agar benih dapat tumbuh lebih maksimal, saat ini mortalitas terjadi sekitar 20%. Pemijahan dengan bantuan penambahan hormon dilakukan terhadap indukan lele, lele yang sudah matang gonad diberi suntikan ovaprim setelah itu dilepas kembali ke kolam / tempat pemijahan dengan dilengkapi kakaban yang cukup dibiarkan selama satu malam. Esok harinya telur akan menempel di kakaban, saat itu induk lele harus segera dipisahkan dari kolam pemijahan. Tiga sampai lima hari kemudian, telur yang dibuahi akan menetas dan terlihat seperti jentik-jentik dan yang tidak menetas akan membusuk dan berwarna putih. Pada saat ini angka mortalitas lebih dari 50%. Secara umum, benih nila yang dihasilkan selama tahun 2019 adalah sebanyak 8.700 ekor dan benih lele sebanyak 1.000 ekor. Namun karena factor cuaca yang tidak terkendali yaitu musim kemarau panjang mengakibatkan kurangnya pasokan air yang dibutuhkan untuk kolam sehingga mengakibatkan kematian massal terhadap induk dan benih ikan nila dan lele. Demikian pula sebaliknya, pada saat musim hujan debit air dari sumber air yang cukup kuat mengakibatkan perubahan suhu yang drastic sehingga tingkat



keasaman meningkat, hal ini pun mengakibatkan angka kematian yang tinggi terhadap induk dan benih. Benih nila yang berhasil didistribusikan dengan cara restocking di Sungai Batang Merao pada saat Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah sekitar 5.000 ekor benih nila. Sedangkan benih yang masih ada sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sekitar 50 ekor nila dan 300 ekor lele.

e. Produksi perikanan budidaya

No	Tahun	Target (ton)	Realisasi( Ton)
1.	2017	62.26	201,86
2.	2018	62.31	64,127
3.	2019	62.36	167,063
4	2020	62.41	224.361
5	2021	62.46	200.000

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2021

Indikator : Tingkat Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan

Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan ; ada peningkatan dari tahun 2019 yaitu 88.88 % menjadi 90 % pada tahun 2020, hal ini karena adanya pembinaan dari dinas yang terus menerus selain itu juga peran dari Pemerintah Provinsi juga telah melakukan pembinaan langsung terhadap POKDAKKAN sebanyak 8 kali selama tahun 2020. selain itu juga dengan adanya Perbantuan penyuluh aparatur perikanan dari pemerintah Pusat saat ini telah membentuk 128 POKDAKKAN yang tersebar di 8 kecamatan

Tahun 2018 : Target produksi perikanan sebanyak 67,15 Ton sedangkan realisasinya 210 Ton ini terjadi kenaikan sebesar 212,7 % ini dikarenakan adanya kerjasama serta sinerginya antara dinas peternakan dan perikanan maupun penyuluh perikanan dalam memberikan pelayanan penyuluhan dan pembinaan kelompok/masyarakat tentang perikanan budidaya. Dan kondisi kolam masih layak (baik) untuk digunakan budidaya ikan.



Tahun 2019 : target produksi 72,14 ton sedangkan realisasi sebanyak 167,063 ton dapat dinyatakan produksi perikanan naik sebesar 179,8 % ini dikarenakan adanya kerjasama serta sinerginya antara dinas peternakan dan perikanan maupun penyuluh perikanan dalam memberikan pelayanan penyuluhan dan pembinaan kelompok/masyarakat tentang perikanan budidaya. Dan kondisi kolam masih layak (baik) untuk digunakan budidaya ikan.

Tahun 2020 : Target produksi perikanan 62,41 ton sedangkan realisasi perikanan budidaya sebanyak 224.361 ton. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan Hal ini disebabkan karena adanya pengaktifan kembali kolam-kolam yang tidak produksi dan dilakukan koreksi data tahun 2018, yang mana pendataan pada tahun dimaksud terjadi mis data banyak tidak terkoreksi

berdasarkan target terhadap realisasi produksi perikanan telah melampaui target yang ditentukan dimana pada tahun 2018 dan tahun 2019 realisasinya kali lipat dari jumlah yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2018 hanya terjadi kenaikan 2 ton dari jumlah target yang ditentukan.

Sedangkan untuk total luas lahan budidaya produktif yang ada di kota sungai Penuh jumlahnya sebanyak 4,3116Ha yang menyebar diseluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, sedangkan untuk kolam yang produktif selama 2020 adalah sebanyak 0,64 Ha maka jika kita hitung tingkat produksinya pembudidayaan ikan dikolam maka dapat kita hitung sebagai berikut :

# Jumlah ikan yang dapat ditebar dalam ukuran 1 m<sup>2</sup> adalah 100 ekor (1 x1 x 100 = 100 ekor/kg)

Jika panen 10 ekor per kg maka  $\Rightarrow 100 / 10 = 10$  ekor/kg

# Untuk 0.64 Ha sama dengan 6.400 m<sup>2</sup>  $\Rightarrow (6.400 \times 100 \text{ ekor} = 640.000 \text{ ekor/kg})$

Jika panen 10 ekor per kg maka  $\Rightarrow 640.000 / 10 = 64.000$  ekor/kg atau 64 ton

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2016-2021) sebanyak 224.361 ton tercapai 359 %;



f. **Tingkat Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan**

Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian	% Pencapaian Terhadap target renstra
	2018	2019	2020		
Cakupan Peningkatan Pengetahuan Peternak/Pembudidaya ikan	83,32	90	95	100	90

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2021

Tahun 2019 target penumbuhan kelompok sebanyak 94 kelompok dan realisasi dari target yang diinginkan dari capaian kinerja program adalah 73 kelompok atau 77,76%. Berdasarkan realisasi pada tahun 2019 adalah sebanyak 75 Kelompok atau 80%. Selanjutnya untuk tahun 2020 penumbuhan kelompok yang ingin dicapai adalah sebanyak 99 kelompok sedangkan realisasi target yang ingin dicapai adalah sebanyak 82 kelompok atau 83,32%. Namun berdasarkan realisasi data penumbuhan kelompok di lapangan pada tahun 2020 sebanyak 83 kelompok atau 83,50% Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan ; ada peningkatan dari tahun 2019 yaitu 88.88 % menjadi 90 % pada tahun 2020, hal ini karena adanya pembinaan dari dinas yang terus menerus selain itu juga peran dari Pemerintah Provinsi juga telah melakukan pembinaan langsung terhadap POKDAKKAN sebanyak 8 kali selama tahun 2020. 128 POKDAKKAN yang tersebar di 8 kecamatan



**g. Persentase pemanfaatan teknologi pakan ternak berbahan dasar baku lokal**

Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian	% Pencapaian Terhadap target renstra
	2018	2019	2020		
Persentase Pemanfaatan Teknologi Pakan Ternak berbahan baku lokal	33 %	39 %	46	109,5 %	46 %

*Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada peningkatan yang baik dari tahun ke tahun, tahun 2018 target 25 % dan realisasi 26 %, kenaikan tertinggi adalah pada tahun 2020 dimana target 40 % dan realisasi 46 %, hal ini disebabkan salah satunya adalah karena harga pakan ditingkatkan penjual tinggi sehingga tidak sesuai dengan pendapatan dari peternak, kondisi seperti ini yang membuat peternak berkreatifitas dalam proses pembuatan pakan ternak dengan memanfaatkan bahan pakan yang tersedia di sekitar. Dinas peternakan dan perikanan kota Sungai penuh pun merancang program dan kegiatan yang menunjang dalam proses pembuatan pakan ternak berbahan dasar lokal, diantaranya yaitu pelatihan pembuatan pakan berbahan dasar jerami yang telah dimulai dari tahun 2018. Dapat dilihat dari Tabel Capaian Target dan realisasi 2017 s/d 2021

**h. Peningkatan Jenis produk olahan Hasil Peternakan**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2017	5	5
2	2018	6	7
3	2019	7	8
4	2020	9	8
5	2021	10	9 (estimasi)

*Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2021*



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target dari produk olahan hasil peternakan ada kenaikan yaitu tahun 2019 dengan target 6 dan realisasi 7 jenis olahan dari ternak, dan untuk tahun 2020 ada kenaikan juga dimana target adalah 7 dan realisasi 8 jenis olahan asal ternak, hal ini terjadi karena adanya minat konsumsi dari masyarakat terhadap olahan hasil ternak, dinas peternakan juga melalui bidang peternakan pada tahun 2019 dan 2020 rutin mengadakan kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan.

1. **Angka Kesakitan/morbiditas ternak (%)**

Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian	% Pencapaian Terhadap target renstra
	2018	2019		
Angka Kesakitan/morbiditas ternak (%)	0	0	1000 %	1 %

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2021

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak telah memenuhi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya (awal RPJMD) yaitu angka kesakitan / Morbiditas dari target yang telah ditetapkan maksimal 1 % yang merupakan indikator dari pemantauan penyebaran penyakit kronis yang terjadi di suatu wilayah yang sifatnya mematikan dan bersifat zoonosis, yaitu : (1) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) (2) Penyakit Jembrana (3) Penyakit Antrax (4) Brucellosis (5) Septicemia Efizootica (SE). Sejak awal tahun 2016 hingga akhir tahun 2018 tidak ditemukan tanda-tanda / kasus di wilayah kota sungai penuh baik ternak besar maupun ternak kecil. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Puskesmas yang secara rutin telah melaksanakan pelayanan secara terus menerus (continue)



b. Dengan adanya pelayanan Vaksinasi Rabieas dan SE yang telah dilakukan secara merata di setiap Desa kecamatan dalam Kota Sungai Penuh

c. Masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap ternak baik itu ternak Besar maupun penyakit hewan kesayangan yang mereka miliki. Sehingga setiap adanya kejadian penyakit mereka secara sukarela melaporkan kepada petugas kesehatan hewan atau peternak membawa ternak / hewan kesayangannya ke UPTD Puskesmas ataupun klinik kesehatan Hewan.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan (2016-2021) Morbinitas ternak sebesar 0 % maka tercapai 100%.

2. Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum pada

tahun 2020 sebesar 234,646 ton dengan capaian kinerja 100,85%. Dibanding dengan capaian tahun 2019 sebesar 204,34 ton meningkat 21,73%. Capaian tahun 2020 dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 115,03 ton meningkat 89,28%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 109,8 ton, capaian tahun 2020 meningkat 147,64%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (2016-2021) sebesar 801,92 ton maka pada tahun 2020 tercapai 100,85%;

3. Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan

Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan pada tahun 2020 sebesar 409,40 kg dengan capaian kinerja 147,80% dibanding target tahun 2019 sebesar 277 kg. Dibanding dengan capaian tahun 2017 sebesar 399,95 kg meningkat 2,36% dan meningkat sebesar 22,35% jika dibandingkan produksi pada tahun 2016 sebesar 334,61 kg. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 328,40 kg maka capaian tahun 2020 meningkat 24,67% dan



dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 296,88 kg maka capaian tahun 2020 sebesar 37,90%. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan Perikanan (2016-2020) sebesar 277 kg maka target peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan telah tercapai 147,80%.

#### Capaian Berdasarkan Realisasi Anggaran

Semua pembangunan sangat erat kaitannya dengan anggaran begitu juga pembangunan Peternakan dan Perikanan tentunya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mencapai goal yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada masa yang akan datang maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi untuk dapat diatasi pada masa yang akan datang. Anggaran dan realisasi Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel T-C.24.

Pelayanan yang diberikan juga ditopang dengan pembiayaan dari APBD maupun APBN. Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan sepanjang tahun 2021-2026.



Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Sungai Penuh

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>											-	-	-	-	-	-	-
1	Pendapatan Pajak Daerah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	-	-	-	-		
2	Hasil Retribusi Daerah	65.798.000	88.000.000	88.186.070	88.186.070	14.630.250	5.916.000	23.678.500	19.096.500	29.260.500	16.450.000	-	26,91	21,65	33,18	112,44	68.960.078,00	18.880.300,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		
<b>II</b>	<b>Belanja SKPD</b>	-	-	-	8.819.470.475,33	4.129.242.700,73	-	-	6.663.551.914,00	8.568.821.092,00	3.832.292.959,00	-	-	-	97,16	92,81	2.589.742.635,21	19.064.665.965,00
1	Belanja Operasi	9.584.116.266,00	5.137.085.355,00		6.532.886.479,33	4.104.602.700,73	8.780.848.000,00	4.841.465.026,00	4.111.116.244	6.357.052.164,00	3.832.292.959,00	91,62	94,25		97,31	93,37	2.127.497.836,01	2.860.092.273,40
1	Belanja Pegawai	2.308.001.406,00	2.437.990.255,00		3.864.624.703,15	3.202.450.531,00	2.208.302.631,00	2.231.725.084,00		3.736.767.399,00	3.038.207.507,00	95,68	91,54		96,69	94,87	2.362.613.379,03	2.243.000.524,20



2	Belanja Barang dan Jasa	4.734.476.860,00	2.523.855.100,00		1.875.311.776,18	902.152.169,73	4.032.730.369,00	2.434.499.942,00		1.851.035.515,00	794.085.452,00	85,18	96,46		98,71	88,02	2.007.159.181,18	1.822.470.255,60
3	Belanja Hibah	2.541.638.000,00	175.240.000,00		792.950.000,00		2.539.815.000,00	175.240.000,00		769.249.250,00		99,93	100,00		97,01		701.965.600,00	696.860.850,00
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.154.252.928,00</b>	<b>440.612.586,00</b>		<b>2.286.583.996,00</b>	<b>24.640.000,00</b>	<b>1.112.286.994,00</b>	<b>399.658.700,00</b>	<b>2.552.435.670,00</b>	<b>2.211.768.928,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,73</b>	<b>-</b>	<b>462.244.799,20</b>	<b>952.840.919,60</b>
1	Belanja Modal Tanah	81.500.000,00	0		712.846.000,00	24.640.000,00	81.500.000,00	0		688.198.018,00		100,00			96,54	-	163.797.200,00	153.939.603,60
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	402.402.928,00	268.612.586,00		174.463.097,00		361.083.994,00	227.658.700,00		124.412.800,00		89,73	84,75		71,31		169.095.722,20	142.631.098,80
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	580.350.000,00	120.000.000,00		635.000.000,00		579.733.000,00	120.000.000,00		634.917.291,00		99,89	100,00		99,99		267.070.000,00	266.930.058,20
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	60.000.000,00	52.000.000,00		764.274.899,00		59.970.000,00	52.000.000,00		764.240.819,00		99,95	100,00		100,00		175.254.979,80	175.242.163,80
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	0		0	0	30.000.000,00	0				100,00						
III	<b>Program</b>		<b>3.173.700.000,00</b>	<b>4.955.000.000,00</b>	<b>4.972.645.772,18</b>	<b>926.792.169,73</b>	<b>-</b>	<b>3.128.458.642,00</b>	<b>4.817.111.011,00</b>	<b>4.854.383.693,00</b>	<b>798.183.500,73</b>	<b>-</b>	<b>98,57</b>	<b>97,22</b>	<b>97,62</b>	<b>86,12</b>	<b>14.028.137.941,91</b>	<b>2.719.627.369,35</b>
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		476.699.075	443.056.000	392.186.576	178.414.938		451.252.714	429.688.998	385.037.653	175.706.624						372.589.147	360.421.497
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR		265.600.000	299.230.000	204.450.000	84.921.141		255.816.733	280.416.332	203.703.193	84.837.639		96			100	213.550.285	206.193.474



3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	48.000.00 0	37.000.0 00	52.500.000	-		48.000.0 00	37.000.000	52.000.000	-		100			34.375.0 00	34.250.0 00
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.0 00	100.000. 000	100.150.00 0	11.966.9 51		99.593.2 72	92.459.448	100.062.78 0	11.966.95 1		100	100	78.029.2 38	76.020.6 13	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	50.000.00 0	170.000. 000	118.100.00 0	58.330.1 99		49.553.0 00	169.287.01 8	117.788.81 7	56.669.70 0		99	97	99.107.5 50	98.324.6 34	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	405.840.0 00	-	-	-		398.042. 486					98		101.460. 000	99.510.6 22	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	200.000.0 00	100.000. 000	2.318.446. 000	328.498. 400		198.902. 700	57.971.000	2.287.909. 839	205.322.3 36		99	99	63	736.736. 100	687.526. 469
8	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	580.000.0 00	478.000. 000	274.590.00 0	162.060. 100		472.371. 975	475.601.19 4	273.284.75 1	161.080.2 51		81	100	99	373.662. 525	345.584. 543
9	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	947.560.9 25	995.748. 000	1.512.223. 196	102.600. 441		906.565. 323	963.779.65 5	1.434.596. 660	102.600.0 00		96	95		889.533. 141	851.885. 410
10	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	100.000.0 00	125.000. 000				99.526.8 00	124.955.77 6				100			56.250.0 00	56.120.6 44
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	150.000.0 00	50.000.0 00				148.833. 639	50.000.000				99			50.000.0 00	49.708.4 10



12	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN			128.557.000						124.817.590								32.139.250	31.204.398
13	PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.028.409.000						2.011.134.000								507.102.250	502.783.500

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>476.699.075</b>	<b>443.056.000</b>	<b>392.186.576</b>	<b>178.414.938</b>	-	<b>451.252.714</b>	<b>429.688.998</b>	<b>385.037.653</b>	<b>175.706.624</b>							372.589.147	360.421.497
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		16.200.000	23.000.000	26.500.000,00	8.800.000,00		11.712.570	19.104.366	23.005.563	7.101.387		72,30	83,06	86,81	80,70	18.625.000	15.230.972	
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		69.780.000	69.780.000	66.900.000,00	52.335.000,00		66.180.000	69.780.000	66.900.000	52.335.000,00		94,84	100,00	100,00	100,00	64.698.750	63.798.750	
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		16.000.000	15.000.000	8.560.000,00	7.946.500,00		16.000.000	15.000.000	8.560.000	7.896.000		100,00	100,00	100,00	99,36	11.876.625	11.864.000	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		14.718.325	20.590.000	18.402.940,00	8.600.000,00		14.718.325	20.589.200	18.106.940	8.599.850		100,00	100,00	98,39	100,00	15.577.816	15.503.579	



1.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.000.000	24.010.000	16.090.536,18	5.967.051,73		19.760.000	23.814.950	16.089.466	5.967.000,73		89,82	99,19	99,99	100,00	17.016.897	16.407.854
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	3.996.100,00	910.000,00		5.000.000	4.700.000	3.996.100	910.000		100,00	94,00	100,00	100,00	3.726.525	3.651.525
1.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.282.750	5.500.000	6.227.000,00	1.910.000,00		19.282.750	4.875.000	6.227.000	1.899.000		100,00	88,64	100,00	99,42	8.229.938	8.070.938
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.220.000	15.000.000	15.000.000,00	2.160.000,00		19.210.000	14.965.000	14.900.000	2.160.000		79,31	99,77	99,33	100,00	14.095.000	12.808.750
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.498.000	9.500.000	11.590.000,00	600.000,00		10.478.000	9.500.000	11.532.000	600.000		99,81	100,00	99,50	100,00	8.047.000	8.027.500
1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	175.000.000	149.591.000	160.000.000,00	53.726.386,00		168.927.069	149.590.482	159.927.784	53.726.386		96,53	100,00	99,95	100,00	134.579.347	133.042.930
1.11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	54.000.000	49.200.000	40.800.000,00	23.550.000,00		50.400.000	49.200.000	37.800.000	22.950.000		93,33	100,00	92,65	97,45	41.887.500	40.087.500
	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa		15.560.000	1.400.000,00				7.260.000	1.400.000				46,66	100,00		4.240.000	2.165.000
1.12	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kependidikan	50.000.000	41.325.000	16.720.000,00	11.910.000,00		49.584.000	41.310.000	16.592.800	11.562.000		99,17	99,96	99,24	97,08	29.988.750	29.762.200
																-	-
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR</b>	<b>265.600.000</b>	<b>299.230.000</b>	<b>204.450.000</b>	<b>84.921.141</b>	<b>-</b>	<b>255.816.733</b>	<b>280.416.332</b>	<b>203.703.193</b>	<b>84.837.639</b>		<b>96,32</b>			<b>99,90</b>	<b>213.550.285</b>	<b>206.193.474</b>



2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	80.000.000	85.000.000	115.500.00 0,00			80.000.000	82.000.000	115.500.00 0			100,00	96,47			70.125.000	69.375.000
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	52.625.000	66.310.000				50.577.000	59.981.000				96,11	90,46			29.733.750	27.639.500
2.3	Pengadaan Mebeleur	37.375.000	30.000.000				37.375.000	29.500.000				100,00	98,33			16.843.750	16.718.750
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.000.000	10.000.000	5.000.000,0 0	69.940.000, 00		8.000.000	10.000.000	5.000.000	69.940.00 0		100,00	100,00	100,00	100,00	23.235.000	23.235.000
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	81.600.000	55.600.000	58.000.000, 00	14.481.140, 73		73.864.733	48.735.332	57.272.018	14.397.63 9		90,52	87,65	98,74	99,42	52.420.285	48.567.431
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.000.000	6.000.000	5.000.000,0 0	500.000,00		6.000.000	6.000.000	4.981.200	500.000		100,00	100,00	99,62	100,00	4.375.000	4.370.300
	Pengembangan Media Data/Informasi		46.320.000	20.950.000, 00				44.200.000	20.949.975				95,42	100,00		16.817.500	16.287.494
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>48.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>-</b>		100,00				34.375.000	34.250.000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	48.000.000	37.000.000	52.500.000, 00			48.000.000	37.000.000	52.000.000			100,00		99,05		34.375.000	34.250.000
																-	-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>100.000.00 0</b>	<b>100.000.00 0</b>	<b>100.150.00 0</b>	<b>11.966.951</b>	<b>-</b>	<b>99.593.272</b>	<b>92.459.448</b>	<b>100.062.78 0</b>	<b>11.966.95 1</b>		99,59			100,00	78.029.238	76.020.613
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.00 0	100.000.00 0	100.150.00 0,00	<b>11.966.951</b>		99.593.272	92.459.448	100.062.78 0	<b>11.966.95 1</b>		99,59	92,46	99,91	100,00	78.029.238	76.020.613



																	-	-
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA</b>		<b>50.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>118.100.000</b>	<b>58.330.199</b>	<b>-</b>	<b>49.553.000</b>	<b>169.287.018</b>	<b>117.788.817</b>	<b>56.669.700</b>		99,11			97,15	99.107.550	98.324.634
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		50.000.000	50.000.000	34.000.000,00	21.330.700,00		49.553.000	49.895.018	33.913.384	21.120.700		99,11	99,79	99,75	99,02	38.832.675	38.620.526
	Pengumpulan dan Pengolahan data Statistik			70.000.000	44.100.000,00	9.881.999,27			69.466.000	44.024.350	9.881.500			99,24	99,83	99,99	30.995.500	30.842.963
	Penyusunan Dokumen Perencanaan			50.000.000	40.000.000,00	27.117.500,00			49.926.000	39.851.083	25.667.500			99,85	99,63	94,65	29.279.375	28.861.146
																	-	-
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEB UNAN</b>		<b>405.840.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>398.042.486</b>					98,08				101.460.000	99.510.622
6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna		146.380.500					140.348.636					95,88				36.595.125	35.087.159
6.2	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna		259.459.500					257.693.850					99,32				64.864.875	64.423.463
																	-	-



7	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>		200.000.00 0	100.000.00 0	2.318.446.0 00	328.498.40 0	-	198.902.70 0	57.971.000	2.287.909.8 39	205.322.3 36		99,45		98,68	62,50	736.736.100	687.526.469
7.1	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan		200.000.00 0			258.916.40 0,00		198.902.70 0			135.917.4 04		99,45			52,49	114.729.100	83.705.026
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul			100.000.00 0					57.971.000					57,97			25.000.000	14.492.750
	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan				154.500.00 0,00					154.174.72 7					99,79		38.625.000	38.543.682
	Peningkatan Operasional Balai Benih Ikan			100.000.00 0,00		34.000.000, 00				95.880.500	33.989.93 2				95,88	99,97	33.500.000	32.467.608
	Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Perikanan (DAK)				1.587.846.0 00,00					1.562.416.9 68					98,40		396.961.500	390.604.242
	Pembangunan /Rehabilitasi/Pembangunan Sarana dan Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air				476.100.00 0,00					475.437.64 4					99,86		119.025.000	118.859.411
	Promosi Produk dan Hasil Olahan Ikan					35.582.000, 00					35.415.00 0					99,53	8.895.500	8.853.750
																	-	-



8	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</b>		<b>580.000.00</b> 0	<b>478.000.00</b> 0	<b>274.590.00</b> 0	<b>162.060.10</b> 0	-	<b>472.371.97</b> 5	<b>475.601.19</b> 4	<b>273.284.75</b> 1	<b>161.080.2</b> 51		81,44		99,52	99,40	373.662.525	345.584.543
8.1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak		290.000.00 0	100.000.00 0	85.000.000, 00	105.840.75 0,00		185.477.87 5	99.916.620	84.943.951	105.636.2 26		63,96	99,92	99,93	99,81	145.210.188	118.993.668
8.2	Pemusnahan Ternak yang Terjangkit penyakit Endemik		100.000.00 0	80.000.000	76.070.000, 00			99.005.300	79.363.000	75.199.800			99,01	99,20	98,86		64.017.500	63.392.025
8.3	Pengawasan Daging Hewan Konsumsi dan Mutu Obat Hewan		100.000.00 0	128.000.00 0	68.520.000, 00	32.764.350, 00		98.050.400	127.103.85 4	68.288.000	32.724.50 0		98,05	99,30	99,66	99,88	82.321.088	81.541.689
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet pada UPTD PUSKESWAN			100.375.00 0	45.000.000, 00	23.455.000, 00			99.692.720	44.853.000	22.719.52 5			99,32	99,67	96,86	42.207.500	41.816.311
8.4	Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana UPTD PUSKESWAN		90.000.000	69.625.000				89.838.400	69.525.000				99,82	99,86			39.906.250	39.840.850
																	-	-
9	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</b>		<b>947.560.92</b> 5	<b>995.748.00</b> 0	<b>1.512.223.1</b> 96	<b>102.600.44</b> 1	-	<b>906.565.32</b> 3	<b>963.779.65</b> 5	<b>1.434.596.6</b> 60	<b>102.600.0</b> 00		95,67		94,87		889.533.141	851.885.410
9.1	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada masyarakat		488.035.40 0		29.229.000, 00			470.313.90 0		5.537.750			96,37		18,95		129.316.100	118.962.913
9.2	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat		75.339.000		100.000.00 0,00			71.949.550		99.628.363			95,50		99,63		43.834.750	42.894.478



9.3	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	49.292.600		45.515.000,00			47.931.720		44.370.000			97,24		97,48		23.701.900	23.075.430	
9.4	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	161.493.000					158.486.502					98,14				40.373.250	39.621.626	
9.5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak			562.745.300					562.116.720					99,89		140.686.325	140.529.180	
9.6	Pengembangan Agribisnis Peternakan			156.460.100	89.460.100,00	24.297.301,00			131.472.605	87.819.754	24.297.301,00			84,03	98,17	100,00	67.554.375	60.897.415
9.7	Pembibitan dan Perawatan Ternak					49.203.140,00					49.202.699				100,00	12.300.785	12.300.675	
9.8	Pembinaan dan Pengawasan Bibit Ternak yang didistribusikan Kepada masyarakat			50.000.000	30.000.000,00				48.698.100	29.874.500				97,40	99,58		20.000.000	19.643.150
9.9	Pembangunan /Rehabilitasi/ Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK)				1.125.237.996,00					1.075.158.293				95,55		281.309.499	268.789.573	
9.10	Pengembangan pengelolaan dan Pemasaran Hasil Ternak			46.542.600	25.781.100,00				43.628.230	25.554.850				93,74	99,12		18.080.925	17.295.770
9.11	Peningkatan Sarana dan Prasarana (RPH)	81.513.806	94.993.350					78.933.806	94.312.950			96,83	99,28			44.126.789	43.311.689	
9.12	Pelayanan Rumah Potong Hewan(UPTD RPH Kota Sungai Penuh )	91.887.119	85.006.650	67.000.000,00		29.100.000,00		78.949.845	83.551.050	66.653.150	29.100.000,00		85,92	98,29	99,48	100,00	68.248.442	64.563.511



																	-	-
10	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</b>		100.000.000	125.000.000	-	-	-	99.526.800	124.955.776	-	-	99,53					56.250.000	56.120.644
10.1	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		100.000.000	125.000.000				99.526.800	124.955.776			99,53	99,96				56.250.000	56.120.644
																	-	-
11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR</b>		150.000.000	50.000.000	-	-	-	148.833.639	50.000.000	-	-	99,22					50.000.000	49.708.410
11.1	Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		150.000.000	50.000.000				148.833.639	50.000.000			99,22	100,00				50.000.000	49.708.410
																	-	-
12	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN</b>			128.557.000	-	-	-	-	124.817.590	-	-						32.139.250	31.204.398
12.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat			128.557.000					124.817.590			97,09					32.139.250	31.204.398
																	-	-



13	<b>PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			2.028.409.00	-	-	-	-	2.011.134.00								507.102.250	502.783.500
13.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Kewenangan Kab/Kota (DAK)			2.028.409.00					2.011.134.00				99,15				507.102.250	502.783.500
	<b>JUMLAH</b>		3.323.700.00	4.955.000.00	4.972.645.72	926.792.170		3.128.458.642	4.817.111.011	4.854.383.693	798.183.501						3.512.395.235	3.368.329.814



## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

### **2.4.1. Tantangan pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kota Sungai Penuh**

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan peternakan dan perikanan di Kota Sungai Penuh ialah:

- Perlunya peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
- Masih belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- Masih tingginya ancaman penyakit ternak dan ikan yang perlu tindakan berkelanjutan dan perlu multi koordinasi antar instansi dan antar wilayah.
- Perlunya peningkatan pemanfaatan limbah peternakan menjadi bahan yang lebih bernilai manfaat.
- Perlunya peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap peternak dan pelaku perikanan pada setiap tahapan produksi.
- Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas produk Peternakan dan Perikanan sehingga memiliki daya saing.
- Perlunya penyediaan sarana produksi Peternakan dan Perikanan.
- Masih tingginya ketergantungan pada input dari luar yang membuat peternak sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produk yang datang dari luar tersebut contoh penyediaan bakalan, penyediaan pakan, dan sarana produksi lainnya.
- Cukup tingginya alih fungsi lahan Peternakan dan Perikanan.
- Masih rendahnya penerapan teknologi Peternakan dan Perikanan.
- Kurangnya minat untuk menjadi peternak sebagai profesi bukan sampingan.
- Kurangnya modal usaha peternak dan pembudidaya ikan.



#### 2.4.2. Peluang pengembangan Peternakan dan Perikanan di Kota Sungai Penuh

Peluang pengembangan Peternakan dan Perikanan adalah :

- Stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban wilayah memberi jaminan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang Peternakan dan Perikanan;
- Partisipasi peternakan dan pembudidaya ikan dalam pembangunan Peternakan dan Perikanan;
- Kerjasama yang baik antara Dinas Peternakan dan Perikanan dan kelompok-kelompok tani ternak dan pembudidaya ikan;
- Potensi wilayah yang mendukung pengembangan Peternakan dan Perikanan;
- Meningkatnya kebutuhan hasil Peternakan dan Perikanan.
- Terbukanya pangsa pasar untuk produk asal ternak baik segar maupun olahan;
- Adanya dukungan kelembagaan Pemerintah yang semakin baik bagi perkembangan peternakan dan perikanan di Kota Sungai Penuh.

Di sektor Perikanan kota sungai penuh merupakan daerah yang mempunyai potensi perikanan berdasarkan luas lahan aktif sebanyak 60,15 Ha, dari luas total 60,15 Ha sebagian antaranya yaitu 49,95 Ha merupakan lahan non produktif dan sisanya 10,20 Ha saja yang merupakan lahan produktif. Kemudian dari 10,20 Ha lahan produktif, 17,2 % merupakan lahan bantuan pemerintah atau sebanyak 1,76 Ha sedangkan 82,7% (8,44 Ha) merupakan lahan milik masyarakat.

Nilai produksi yang dihasilkan berdasarkan 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sebanyak 386 ton, tahun 2017 sebanyak 311,6 ton dan tahun 2018 sebanyak 318,6 ton. Dimana adanya variasi jumlah produksi ikan per tahun ini berkorelasi kuat dengan sumber bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dimana pada tahun 2016 (terdapat bansos), tahun 2017 (terdapat bantuan bansos) sedangkan tahun 2018 (hanya berupa dana pendampingan) sehingga dapat dilihat adanya pengaruh nyata pengembangan perikanan terhadap



anggaran pemerintah. Berdasarkan penghitungan angka konsumsi ikan oleh provinsi Jambi tahun 2017 Kota Sungai Penuh mempunyai tingkat konsumsi ikan sebanyak 29 kg/kapita/tahun ini berarti rata-rata tingkat konsumsi perorang adalah 29 kg dalam satu tahun, bila dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Sungai Penuh sebanyak 104,204 jiwa maka kebutuhan ikan Kota Sungai Penuh 2019 adalah  $(29 \text{ kg/kapita/tahun} \times 104.24 \text{ jiwa})$  sebanyak 3.021.916 kg atau 3.021,91 ton.

Jika dikonversikan antara konsumsi ikan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan produksi ikan yang dihasilkan (3.021,91 ton - 311,66 ton) maka kekurangan ikan/ ikan yang didatangkan dari luar daerah sebanyak 2.710,25, dimana ragam jenis ikan ini terdiri dari mas, nila, lele dan sebagiannya terdiri dari jenis ikan laut. Keterbatasan jumlah ikan ini pada dasarnya bukanlah kendala bagi Kota Sungai Penuh untuk memenuhi kebutuhan ikan melebihi dari jenis ikan laut yang memang diharuskan didatangkan dari luar daerah, tapi merupakan peluang usaha bagi masyarakat Kota Sungai Penuh untuk pengembangan lahan-lahan budidaya yang ada khususnya pada area terbuka yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti kawasan air tergenang daerah jembatan Kerinduan perbatasan antara Sungai Penuh, Pondok Tinggi dan Kecamatan Tanah Kampung.

Beberapa daerah kecamatan dalam Kota Sungai Penuh disamping potensi wilayah dalam pengembangan budidaya seperti Tanah Kampung, Kumun Debai, Sungai Bungkal dan Pesisir Bukit, kemudian pengembangan perikanan tangkap seperti Pondok Tinggi dan Kota Sungai Penuh, juga terdapat dua kecamatan lainnya yaitu Hambaran Rawang dan Koto Baru yang mempunyai potensi besar untuk pengembangan pasca panen berupa pengolahan ikan seperti salai.

Arah kebijakan rencana program yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengoptimalkan budidaya perikanan berupa bantuan sarana dan prasarana, pembuatan pakan sendiri, penyuluhan/pembinaan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusianya. Sedangkan untuk area penangkapan berupa pembuatan lahan baru berupa waduk/danau buatan disekitar jembatan Kerinduan dengan kerjasama antar instansi Perikanan, PU, Pariwisata sehingga selain sebagai area tangkapan untuk pengembangan ikan endemik (ikan lokal) juga dapat dijadikan sebagai tempat wisata dan area penampungan air ketika banjir. Sedangkan untuk pengolahan pasca panen perlu adanya pembuatan bangsal



yang memadai untuk proses pengasapan, penjemuran dan penampungan sehingga produksi yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan kuantitas, disamping itu perlu adanya membuka unit pengolahan baru mengingat terbatasnya ketersediaan ikan salai di kota sungai penuh dimana ketersediaan bahan baku menjadi tantangan untuk pengembangan budidaya perikanan dalam penyediaan bahan dasar pembuat salai (ikan) yang secara tidak langsung ketergantungan bahan baku dari luar daerah menjadi minim. Sehingga siklus produksi, pengolahan dan pemasaran menjadi satu kesatuan alur ekonomi di kota Sungai Penuh yang tidak terpisahkan.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas
2. Masih kurangnya sinergitas antar kegiatan sehingga capaian target belum dapat diraih secara maksimal
3. Hasil evaluasi dan pengendalian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan
4. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi kegiatan terutama bagi kegiatan yang dampaknya belum bisa dilihat dalam waktu singkat
5. Terbatasnya penerapan teknologi bagi peternak;
6. Fluktuasi harga komoditas peternak;
7. Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang sehat dan berkualitas;
8. Adanya pencemaran lingkungan oleh limbah peternakan;
9. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh;
10. Terbatasnya kuantitas sumberdaya aparatur di Dinas Peternakan dan Perikanan;
11. Terbatasnya anggaran pembangunan peternakan dan perikanan;



Tabel T-B.35  
Pemetaan Permasalahan Untuk Pentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan pengangguran	Rendahnya produksi peternakan dan perikanan	Kurangnya Penyediaan induk/bibit ternak
		Rendahnya Ketersedian stok ternak dalam memenuhi permintaan	Kurangnya Sumberdaya Petugas Inseminator
			kurangnya pemanfaatan potensi Sumber daya Alam
			Belum optimalnya Penerapan teknologi Tepat guna dalam Pengolahan Pakan Ternak berbahan baku lokal dan teknis budidaya
			Penerapan Teknologi Tepat Guna belum Maksimal di terapkan oleh Masyarakat
		Kurangnya ketersediaan Obat-obatan dan Vaksin hewan dan Ternak	
		Rendahnya Ketersedian stok Ikan dan Bahan Baku dalam memenuhi permintaan	Lahan budidaya perikanan terbatas
	Belum termanfaatkan areal genangan (pasca banjir) untuk areal budidaya perikanan.		
			Kurangnya Potensi sumber Air yang Cukup dan Memadai
			kelompok pembudidaya ikan masih bergantung terhadap pakan ikan pabrikan sehingga harga menyebabkan harga produksi tinggi



			Kelembagaan UPTD Balai Benih Ikan belum Optimal
			Pembangunan BBI sarana dan ketersediaan Prasarana BBI belum lengkap
			Kelembagaan UPTD Balai Benih Ikan belum Optimal
			Sulitnya mendapatkan induk ikan yang unggul
			Pembangunan BBI sarana dan ketersediaan Prasarana BBI belum lengkap
			Kurangnya minat bakat dan keetrampilan Masyarakat untuk mengolah Hasil produk perikanan dan perikanan
			Masih mengandalkan bahan baku dari luar daerah

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, Maka Pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas Otonomi dan tugas Pemabantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat , serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan Visi Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menurut RPJMD adalah “

*TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH MENJADI KOTA PENDIDIKAN, BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG MANDIRI, MASYARAKAT YANG RELEGIUS, BERBUDAYA DAN*



*SEJAHTERA Dengan Slogan MAJU dan BERKEADILAN*

### **PENDIDIKAN**

Diartikan bahwa Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi Pusat Pendidikan yang berkualitas maju dan mandiri berwawasan lingkungan dan bertaraf internasional sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, inovatif tangguh menghadapi tantangan dan berguna bagi bangsa dan Masyarakat.

### **EKONOMI KERAKYATAN YANG MANDIRI**

Diartikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang usaha kecil dan menengah, Jasa Perdagangan, Koperasi Home Industri dan Sektor Ekonomi lainnya serta menggali sumber daya yang ada sehingga terwujud masyarakat yang dapat hidup layak baik secara fisik maupun non Fisik

### **RELEGIUS**

Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman Nilai-nilai agama secara nyata baik dan benar sehingga tercermin dalam pola pikir bertingkah laku dan kehidupan bermasyarakat sebagai pencitraan diri sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya

### **BUDAYA**

Diartikan bahwa Masyarakat Kota Sungai Penuh adalah masyarakat yang beradat, memiliki corak budaya yang beraneka ragam dan berbagai suku akan dibina menjadi khasanah kekayaan Budaya Kota Sungai Penuh sehingga menjadi aset wisata di propinsi Jambi

### **SEJAHTERA**

Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata



tingkat Pendapatan yang memadai, tingkat Pendidikan yang cukup dan derajat Kesejahteraan yang baik, sehingga dapat hidup layak aman dan tentram.

### **MISI :**

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter tinggi. berbasis nilai agama. dan budaya
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang baik, mandiri dan bebas KKN
3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi Daerah
4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Menciptakan Pelestarian Lingkungan Hidup
7. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban

### **Penjabaran Misi :**

1. **Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama dan Budaya Masyarakat**
  - a. Meningkatkan kualitas pendidikan formal maupun non formal melalui:
    - Manamen pendidikan yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi
    - Meningkatkan mutu tenaga pendidik
    - Meningkatkan sarana dan prasarana
    - Memberikana beasiswa kepada masyarakat kurang mampu berupa pendidikan dasar 9 tahun gratis bagi masyarakat kurang mampu



- b. Meningkatkan kualitas kesehatan melalui :
  - Meningkatkan akses layanan kesehatan,
  - Adanya jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu
  - Peningkatan mutu tenaga kesehatan
  - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (peningkatan puskesmas
    - menjadi puskesmas rawat inap)
  - Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan budaya melalui peningkatan peran tokoh agama dan budaya serta keluarga sehingga melahirkan masyarakat yang berakhlakul karimah.
- d. Membudayakan Alquran
- e. Pembinaan generasi muda yang berkelanjutan antara lain melalui penyelenggaraan even-even olahraga, seni dan budaya skala kota

## **2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh Yang baik, mandiri dan bebas KKN**

- a. Optimalisasi Penerapan e-Government dalam tata kelola Pemerintahan
- b. Penyelesaian masalah penyerahan asset dan hutang Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci.

## **3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah**

- a. Membangun struktur perekonomian Yang kokoh pada sektor perdagangan (eceran dan grosir), industri kecil dan menengah (IMKM) serta jasa sebagai unggulan kompetitif
- b. Membangun sentra ekonomi terpadu sesuai dengan potensi (Pengembangan UMKM)
- c. Mengembangkan mitra usaha melalui BUMDES. BUMD dan BUMN



- d. Merevitalisasi pasar yang higienis dan terintegrasi
- e. Meningkatkan usaha di bidang jasa pendidikan, kesehatan dan pariwisata (biro wisata)
- f. Identifikasi dan penataan objek wisata baru dan pengembangan objek wisata serta memperluas destinasi wisata dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dan masyarakat

**4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman**

- a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni (Bedah rumah)
- b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman (jalan lingkungan, MCK, waterhydrant)
- c. Peningkatan pelayanan pengelolaan air bersih melalui kelembagaan dan sarana prasarana lainnya
- d. Pembangunan fasilitas perhubungan dan penegakan peraturan
- e. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga seni dan budaya
- f. Sinkronisasi Pembangunan infrastruktur fasilitas umum (Jaringan PDAM, PLN, Telkom, Jalan dan Drainase)

**5. Meningkatkan PAD**

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
- b. Peningkatan kualitas Penatalaksanaan kelembagaan pengelolaan PAD
- c. Menciptakan sumber-sumber pendapatan baru
- d. Kebijakan mempermudah di bidang investasi

**6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup**

- a. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui,



bagi kemakmuran masyarakat melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya

- b. Pembangunan sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Optimalisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Mengurangi, Menggunakan Kembali dan Mendaur Ulang)
- c. Realokasi TPA di Renah Kayu Embun (RKE) yang mengacu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi
- d. Peningkatan armada pelayanan persampahan
- e. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bekerja sama dengan BUMD, BUMN, Swasta dan masyarakat
- f. Pemanfaatan lahan kritis dan lahan tidur menjadi lahan produktif

#### **7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban**

- a. Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban kota
- b. Penegakan supremasi hukum dan HAM

Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan untuk 5 tahun kedepan diperlukan strategi. Strategi yang berhubungan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan adalah :

1. Meningkatkan Efektifitas Program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Andalan Dalam Negeri)
2. Membangun Sarana dan Prasarana Perbibitan ternak
3. Memaksimalkan pembuatan pakan Lokal yang berkualitas
4. Meningkatkan pembinaan kelompok disektor peternakan dan Perikanan



5. Meningkatkan kapasitas Balai Benih ikan (BBI) dalam penyediaan bibit baik kualitas maupun kuantitas
6. Pengembangan kawasan perikanan Tangkap dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Lubuk Larangan
7. Mengefektifkan pembinaan dan pelatihan Kelompok Ternak dan Kelompok Pembudidaya Ikan
8. Promosi atas hasil produk peternakan dan perikanan
9. Mengembangkan dan melakukan pembinaan terhadap produktifitas kelompok Peternakan dan Perikanan
10. Membangun Kerjasama kemitraan pemasaran produk peternakan dan perikanan
11. Mejamin ketersediaan Produk pangan asal ternak dan ikan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
12. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak
13. Meningkatkan Sumberdaya Manusia pembudidaya ikan melalui IPTEK perikanan
14. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Peternak melalui IPTEK Peternakan
15. Meningkatkan kapasitas SDM petugas Kesmavet
16. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sesuai peran dan fungsi
17. peningkatan disiplin kerja aparatur
18. Pemanfaatan teknologi data dan informasi
19. Mendorong pengembangan sumberdaya masyarakat peternakan melalui good farming practice

Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan, dirumuskan arah kebijakan Umum RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026, yang berkaitan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan yaitu :

1. Peningkatan Populasi melalui pengembangan mutu genetik dan benih komoditas unggulan
2. meningkatkan sinergitas seluruh komponen masyarakat Peternakan, aparatur dan pelaku usaha peternakan



3. Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) di sentra-Sentra Peternakan Rakyat
4. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak
5. Mengoptimalkan pembangunan dan meningkatkan manajemen unit perbibitan ternak
6. Mengoptimalkan operasional unit perbibitan ternak secara terpadu
7. Pelatihan pembuatan pakanikan
8. Fasilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan
9. Mengoptimalkan pembangunan dan meningkatkan manajemen Balai Benih Ikan (BBI)
10. Mengoptimalkan operasional Balai Benih Ikan secara terpadu
11. Mengaktifkan Kolam / potensi lahan perikanan yang tidak produktif produktif
12. pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan
13. Melakukan Pelatihan dan Pembinaan kelompok budidaya maupun kelompok usaha peternakan dan Perikanan
14. Pengembangan Manajemen usaha peternakan dan perikanan
15. Optimalisasi peningkatan pendampingan perikanan budidaya air tawar dan perikanan tangkap
16. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat
17. Mengefektifkan Pameran sebagai ajang memperkenalkan produk hasil Peternakan dan Perikanan
18. Memperluas Jaringan Pemasaran Hasil Produk hasil Peternakan dan Perikanan
19. Mempasilitasi Kelompok dalam meningkatkan keanekaragaman Produk usaha peternakan dan perikanan
20. meningkatkan sarana dan prasarana pemasaran produk hasil peternakan dan perikanan
21. Mengoptimalkan pengembangan dan pembinaan terhadap produktifitas kelompok petani peternak
22. melakukan pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan dan ikan serta kesehatan masyarakat dan hewan



23. Meningkatkan pengendalian penyakit asal ternak dan ikan
24. Mempasilitasi dan mendorong pemotongan asal ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Sungai Penuh
25. Meningkatkan Pengelolaan PAD
26. Mengoptimalkan pembinaan dan Pelatihan SDM Petugas
27. meningkatkan fungsi penegelolaan, pengamatan, penyidikan penyakit hewan
28. meningkatkan fungsi pengelolaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan
29. mengoptimalkan pemanfaatan diklat teknis aparatur
30. meningkatkan kualitas perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat
31. peningkatan proses atau teknik budidaya yang baik untuk skala usaha peternakan
32. peningkatan kapasitas kelompok melalui penerapan iptek
33. peningkatan proses atau teknik budidaya yang baik untuk skala usaha perikanan

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten Kota**

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Daerah/Kota saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat.

Faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan SKPD terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Peningkatan Produktivitas ikan nila, lele	Rendahnya ketersediaan ikan	Pemantauan mutu benih dan Pengadaan induk unggul	Kurangnya benih dan induk ikan unggul
			dan paket penerapan standar pembenihan di UPR dan UPTDBBI	
2	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan	Rendahnya SDM pembudidaya ikan	Adanya kesadaran kelompok/masyarakat dalam pengembangan budidaya ikan	Usaha perikanan masih merupakan usaha sampingan bukan sebagai mata pencaharian
3	Peningkatan produktivitas ternak sapi, domba, kambing, ayam pedaging, ayam petelur dan ayam buras	'Kurangya Ketersediaan Hijauan Makanan Ternak 'Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Bahan Baku Lokal	Memaksimalkan pembuatan pakan sendiri  Memfasilitasi Teknologi Alat dan Mesin Pakan Ternak	Pada musim kemarau rumput tidak mencukupi untuk kebutuhan pakan
4	Jumlah kelompok taniternak yang mendapatkan pelatihan	Rendahnya SDM petani ternak	Pengembangan SDM dan pengembangan teknologi	Terbatasnya SDM untuk terjun langsung ke lapangan

Dalam Renstra Menteri Pertanian RI diuraikan bahwa persoalan yang



mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, lahan dan air; sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan; lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan Nasional; keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani dan penyuluhan; masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; rendahnya nilai tukar petani (NTP), dan belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian.

Dengan mengacu RPJMN, selama lima tahun kedepan (2019-2024), Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (2019-2024) sebagai berikut :

- (i) Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak ; (ii) Meningkatkan populasi dan produktifitas ternak; (iii) Meningkatkan produksi pakan ternak; (iv) Menjamin Produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; dan (v) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kebijakan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak akan diarahkan untuk : (i) mengoptimalkan kelembagaan perbibitan dan sertifikasi; (ii) pembilayahan sumber bibit berbasis potensi dan agroekosistemnya; (iii) pengembangan kawasan/sentra sumber bibit; (iv) pelestarian sumberdaya genetik secara berkelanjutan; (v) peningkatan penerapan teknologi perbibitan; (vi) pengembangan usaha dan investasi perbibitan.

Dalam aspek populasi dan produktifitas ternak diarahkan untuk : (i) meningkatkan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia dan non ruminansia; (ii) melaksanakan revitalisasi persusuan; (iii) melaksanakan restrukturisasi perunggasan; dan (iv) pengembangan kelembagaan dan usaha.

Pada aspek produksi pakan ternak diarahkan untuk : (i) menambah penyediaan pakan dan air; (ii) mengembangkan teknologi dan industri pakan ternak berbasis sumberdaya lokal; (iii) meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan; serta (iv) pengembangan dan pemanfaatan lahan kehutanan.

Pada aspek kesehatan hewan diarahkan untuk : (i) meningkatkan



perlindungan hewan, pengamatan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan; (ii) meningkatkan pelayanan kesehatan hewan; (iii) meningkatkan kualitas dan kuantitas obat hewan; (iv) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter hewan dan para medik veteriner.

Pada aspek keamanan produk hewan akan diarahkan untuk : (i) menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner; (ii) meningkatkan jaminan produk hewan yang ASUH dan daya saing produk hewan; (iii) meningkatkan penerapan kesrawan; (iv) mengoptimalkan pengaturan stock daging; dan (v) mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran daging sapi.

Selanjutnya pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan diarahkan untuk : (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan; (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat; (iii) meningkatkan kerja sama internasional; (iv) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, data dan informasi; (v) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam pembangunan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memiliki sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMN 2019-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni :

- (i) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (ii) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya alam (SDA) yang berkelanjutan, (iii) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (iv) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (v) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, (vi) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan (vii) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP



dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

1. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
2. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan pembangunan kelautan dan Perikanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya.
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

### **3.3.1 Telaahan Kebijakan Provinsi**

#### **3.3.1.1. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH**

##### **VISI**



Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

**“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**

a. Jambi Maju

Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

b. Jambi Aman

Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Jambi Nyaman

Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat



kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

d. Jambi Tertib

Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

e. Jambi Amanah

Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

f. Jambi Profesional

Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

**MISI :**

**Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:**

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas



unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Keterkaitan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih dengan pencapaian Misi dan Program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ingin diwujudkan tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

### **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026**

<b>VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah</b>		
Memulihkan Perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Pengadaan alat mesin pertanian dan non pertanian <b>serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin</b>
		Mendorong pengembangan komoditas unggulan <b>daerah</b>
		Peningkatan produksi pertanian melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk
		Membangun database petani menurut komoditas yang diusahakan
		Peningkatan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna
		Revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan
	Mendorong pengembangan komoditas unggulan <b>daerah</b>	
	Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Pembangunan kawasan lumbung pangan (food estate)
Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi ternak		
Mendorong peningkatan peran PPL		

#### **A. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai **Visi** “



**“Terwujudnya Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai daya saing komparatif dan kompetitif “**

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, ditunjang dengan **Misi** yaitu :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur kelautan dan perikanan serta masyarakat nelayan/pembudidaya ikan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya;
4. Menciptakan iklim yang mendukung pengembangan usaha dan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan;

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh adalah salah satu dokumen perencanaan wilayah yang dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.

Sedangkan kajian lingkungan hidup strategis adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Adapun pada pelaksanaannya untuk mendukung Visi : **TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH MAJU (Mandiri, Jujur, Unggul ) dan BERKEADILAN 2021-2026**

Dalam rangka menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Peternakan dan Perikanan diarahkan pada konsep kawasan terintegrasi dan disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia, untuk mempermudah dan mensesederhanakan pola keterkaitan tata ruang maka dibuat zona-zona yang menggambarkan arah dan prioritas pengembangan.

Berdasarkan Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh pada RTRW merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang



meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budaya. Rencana pola ruang berfungsi sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota; mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahun untuk 20 (dua puluh ) tahun; serta sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota. Rencana pola ruang dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang kota; daya dukung dan daya tampung wilayah kota; kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dirumuskan rencana pola ruangan Kota Sungai Penuh.

Rencana Pola Ruang untuk Budidaya Peternakan tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, arahan pengembangan peternakan ini dilakukan di setiap Kecamatan. Rencana pengembangan budidaya peternakan diarahkan menyebar diseluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh melalui :

1. Penggunaan lahan secara terpadu
2. Pengelolaan pemasaran hasil ternak secara lebih baik terutama untuk pemasaran lokal dan regional.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong yang mempengaruhi Permasalahan Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Misi dan Program KDH dan WK. KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 3 Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi Daerah			
A	PROGRAM PENGELOLAAN	Masih rendahnya	- Kelemahan kelembagaan	- Pengembangan kawasan



	PERIKANAN BUDIDAYA	ketersediaan ikan	<p>dan permodalan kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan /SDM pembudidayaikan masih rendah</li> <li>- Usaha perikanan masih merupakan usaha sampingan</li> <li>- Ketersediaan benih dan induk ikan unggul masih kurang</li> <li>- Kesadaran masyarakat masih kurang dalam memelihara sumber daya air</li> </ul>	<p>budidaya perikanan (Minapolitan )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pemanfaatan UPTD pembenihan ikan</li> <li>- Peningkatan sosialisasi dan pelatihan kelompok pembudidaya ikan</li> <li>- Pengadaan induk ikan unggul dan paket penerapan standar pembenihan di UPR dan UPTD pembenih ikan</li> <li>- Pemantauan mutu benih</li> <li>- Pemantauan hama dan penyakit ikan, pengendalian pencemaran perairan kawasan perikanan dan pemantauan residu logam berat, obat ikan (antibiotic) dan bahan kontaminan</li> </ul>
B	Program Peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak	Tingginya biaya produksi usaha ternak dan rendahnya SDMpeternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada musim kemarau rumput tidak mencukupi untuk kebutuhan pakan</li> <li>- Terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia untuk terjun langsung ke lapangan dan wilayah Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan pembuatan pakan sendiri/ fermentasi</li> <li>- Pengembangan SDM untuk petugas dan peternak</li> </ul>



			Sungai Penuh cukup luas	
C	Program Penanggulangan Penyakit Hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya ancaman penyakit hewan yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha</li> <li>- Penanggula n gan penyakit hewan menular strategis masih terkendala factor social, ekonomi, budaya, masyarakat dan kelembagaa n</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan peternak dan pembudidaya ikan dalam melaksanakan Good Farming Practice dan CBIB masih rendah</li> <li>- Belum optimalnya chek point ternak yang berguna untuk screening ternak sebelum masuk ke Kota Sungai Penuh</li> <li>- Terbatasnya SDM untuk terjun ke lapangan dan wilayah Kota Sungai Penuh yang cukup luas dan topografi mayoritas pegunungan menghambat respon cepat tanggap dari petugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan petunjuk metode dalam melaksanakan sesuai dengan cara dan teknis</li> <li>- Tersedianya petunjuk mekanisme screening lalu lintas ternak yang keluar masuk Kota Sungai Penuh</li> <li>- yang kompeten dan terintegrasi</li> <li>- Dukungan dari kelembagaan peternak dan masyarakat penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis( PHMS)</li> </ul>
D	Program Peningkatan Produksi	Tingginya biaya produksi usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada musim kemarau kesulitan akan air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan pembuatan pakan mandiri</li> </ul>

Sedangkan Rencana Pola Ruang budidaya Peruntukan Perikanan kawasannya tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, arahan pengembangan kawasan ini dilakukan di setiap Kecamatan untuk memanfaatkan Sungai Batang Merao sebagai areal pengembangan budidaya perikanan darat serta pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) dalam



Kota Sungai Penuh untuk menunjang pengembangan budidaya perikanan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis urusan Peternakan dan perikanan dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu :

1. Tingkat konsumsi daging masyarakat Kota Sungai Penuh (perkapita pertahun) masih rendah.
2. Produktivitas hasil peternakan dan perikanan masih rendah (konvensional).
3. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Sungai Penuh (perkapita pertahun) masih rendah.
4. Belum termanfaatkan areal genangan (pasca banjir) untuk areal budidaya perikanan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pembenihan ikan/ produktifitas UPTD BBI Masih Rendah
6. Terbatasnya akses peternak dan pembudidaya ikan terhadap sumber permodalan;
7. Masih rendahnya kapasitas dan kelembagaan peternak dan pembudidaya ikan;
8. Ketersedian sumber daya manusia disektor perikanan danPeternakan masih rendah
9. Tingginya ancaman penyakit pada ternak dan ikan
10. Belum optimalnya pengembangan kawasan perikanan danpeternakan sesuai dengan potensi wilayah

Analisis lingkungan strategis adalah pengujian Visi dan Misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

#### **A. Analisis Lingkungan Strategis**



Analisis lingkungan internal dilakukan dengan fokus menilai dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh yang akan mempengaruhi kinerja Dinas. Lingkungan internal terdiri dari komponen atau variabel lingkungan yang berasal atau berada di dalam jangkauan intervensi Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai. Karena sifatnya yang berasal dari dalam maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai lebih memiliki *bargain value* untuk berkompromi atau menyiasati komponen yang berada di dalam lingkungan internal.

Faktor kekuatan adalah bagian dari faktor strategis internal, dianggap sebagai kekuatan karena dapat mendukung Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai dalam pelayanan pengembangan peningkatan produksi Peternakan dan Perikanan. Oleh karena itu faktor kekuatan harus dimanfaatkan secara maksimal. Faktor kekuatan utama yang dimiliki Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat adalah:

#### **1.1. Kekuatan (Strengths)**

##### **a. Eksistensi Kelembagaan Yang Kuat**

Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Pasal 28 Nomor 21 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Sungai Penuh dan Peraturan Walikota.

##### **1. Dukungan Pimpinan**

Komitmen Pimpinan untuk menjadikan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh sebagai organisasi yang berkompoten dalam pembangunan peternakan dan perikanan, merupakan modal dasar yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Konsolidasi internal dengan berbagai bidang untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta konsolidasi eksternal dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi merupakan langkah yang nyata dalam membangun kompetensi.



## **2. *Kualitas Sumberdaya Manusia***

Kualitas sumberdaya manusia yang berpendidikan SLTA, D3, S1 dan S2 sangat mumpuni untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang akan memajukan peternakan dan perikanan Kota Sungai Penuh.

## **3. *Dukungan Stakeholders***

Kelompok-kelompok petani peternakan dan perikanan yang ada di Kota Sungai Penuh merupakan mitra pendukung keberhasilan kemajuan Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh

## **4. *Potensi Sumberdaya Alam***

Potensi sumberdaya yang cukup (lahan hijau dan perairan) bagi perkembangan peternakan dan perikanan, dengan pemanfaatan teknologi budidaya dan teknologi pakan.

## **5. *Koordinasi lintas institusi***

Dalam melaksanakan pelayanan pengembangan peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh telah memiliki jalinan kerjasama yang cukup baik dengan sejumlah institusi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kerjasama yang baik tersebut telah dijalin baik secara vertikal Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian maupun secara horizontal dengan jajaran dan OPD teknis lingkup Kota Sungai Penuh serta sejumlah lembaga swasta yang terkait. Sejauh ini kerjasama lintas institusi tersebut telah banyak membantu Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## **6. *Bertambahnya jumlah PPL***

Dengan adanya Koordinasi Penyuluhan Perikanan (Luhkan) kedalam Dinas Peternakan dan Perikanan sehingga dapat menambah tenaga/jumlah Petugas Penyuluh Lapangan yang bertanggung jawab di setiap kecamatan untuk menunjang fungsi pelayanan pengembangan khususnya pengembangan di sector Perikanan



Faktor kelemahan adalah bagian dari faktor strategis internal. Faktor tersebut dianggap sebagai kelemahan karena akan menjadi penghambat bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh dalam menyelenggarakan pelayanan pengembangan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan. Dalam peningkatan pelayanannya maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh harus mampu meminimalkan pengaruh faktor ini, yaitu:

#### 1) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan pengembangan Peternakan dan Perikanan terutama untuk penunjang operasional lapangan masih sangat terbatas. Sarana dan prasarana teknis seperti kendaraan operasional petugas teknis, puskesmas, obat-obatan ternak, alsintan, bibit, Indukan ikan unggul masih dirasakan kurang baik jumlah maupun kualitasnya. Keterbatasan ini menjadikan pelayanan pengembangan dan pembinaan peternakan dan perikanan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

#### 2) Pelaksana Teknis Lapangan

Sejauh ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh masih kurangnya aparatur petugas teknis yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pelayanan yang ada di lapangan. Petugas teknis yang membantu pemberian pelayanan pengembangan dan pembinaan peternakan dan perikanan adalah aparatur yang bekerja di kantor / Strukturan, yang bertanggungjawab secara langsung kepada Dinas. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan di lapangan dan juga kurangnya aparatur pelaksana teknis lapangan ini mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam pemberian pelayanan kepada petani/peternak serta kurang terpantaunya program yang ada secara berkelanjutan.

#### 3) Mutu Sumberdaya Aparatur

dari aspek jumlah, sumberdaya aparatur pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh juga kurang cukup memadai tetapi dari aspek



kualitas masih memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Sebagai OPD tingkat kota, Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh membutuhkan aparatur yang mampu berperan sebagai konseptor dalam menyusun berbagai acuan pelaksanaan, sebagai jabaran dari pedoman yang telah disusun oleh lembaga yang lebih tinggi. Dari pengalaman selama ini ternyata tidak banyak aparatur yang memiliki kemampuan untuk itu. Sejauh ini sebagian besar aparatur masih lebih terfokus pada kegiatan teknis lapangan dari pada konseptor.

#### 4). Kelembagaan UPTD

Belum optimalnya kelembagaan UPTD menyebabkan pelayanan tidak optimal beberapa penyebab belum optimalnya tersebut adalah Sumber daya teknis di lapangan yang sangat sedikit, dan belum keterbatasan sarana, akses menuju UPTD yang belum refresntatif

#### **Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah faktor-faktor diluar lembaga kedinasan yang ikut mempengaruhi dan mewarnai terhadap kebijakan pembangunan peternakan dan perikanan di Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini faktor-faktor luar termaksud adalah situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi.

Analisis Lingkungan Eksternal bertujuan untuk mengetahui perkembangan kondisi lingkungan eksternal yang memiliki dampak terhadap hasil pembangunan peternakan dan perikanan di Kota Sungai Penuh dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi analisis lingkungan eksternal yang dapat memberikan dampak berupa peluang dan tantangan.

Dari pengamatan terhadap lingkungan eksternal ini dapat diidentifikasi faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi pembangunan peternakan dan perikanan di Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

#### **1.2. Peluang (Opportunities)**

##### ***a. Meningkatnya Kebutuhan Produksi Asal Ternak yang***



***berkualitas***

Masyarakat semakin sadar akan gizi sehingga kebutuhan produksi bahan asal ternak yang berupa daging, telur dan ikan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan ini dipicu oleh semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan dalam menjaga kesehatan dan kecerdasan.

***b. Terbukanya Pangsa Pasar untuk Produksi Asal Ternak dan Ikan, serta Produk Olahan Asal ternak dan Ikan***

Disektor agribisnis peternakan dan perikanan masing-masing pelaku usaha memiliki peluang dan pangsa pasar yang baik, pangsa pasar untuk produksi asal ternak dan ikan yang berupa daging, telur dan ikan untuk pemasaran lokal maupun regional masih terbuka lebar. Demikian pula untuk produk olahan seperti olahan telur, daging dan ikan memiliki pangsa pasar yang masih sangat terbuka.

***c. Perkembangan dan Kemajuan Teknologi Peternakan dan Perikanan***

Merupakan peluang besar untuk memfasilitasi para pelaku agribisnis peternakan dan perikanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dan ikan. Teknologi Inseminasi Buatan (IB) dan Embrio Transfer (ET), teknologi pakan dan pengolahan hasil ternak dan ikan akan dapat meningkatkan produksi ternak dan ikan dan hasil olahannya secara nyata. Teknologi ini perlu diterapkan dan terus disosialisasikan kepada para pelaku agribisnis peternakan dan perikanan.

**1.3. Ancaman (Threats)**

***a. Kebijakan Fiskal***

Terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia dalam memenuhi aspirasi masyarakat terhadap pembangunan Peternakan dan Perikanan di Kota Sungai Penuh.

***b. Penegakan Hukum***



Masih lemahnya penegakan hukum di bidang peternakan dan perikanan, diakibatkan karena kurangnya kesadaran pelaku usaha peternakan dan perikanan dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan masih terbatasnya yang menjadi pegangan aparaturnya dalam menjalankan tugasnya.

**c. *Persaingan Produk Peternakan dan Perikanan***

Semakin tingginya persaingan kualitas/mutu produk peternakan dan perikanan terutama dalam lingkup regional.

**d. *Fluktuasi Harga***

Produksi peternakan dan perikanan memiliki fluktuasi harga terutama untuk produksi telur dan daging. Fluktuasi ini disebabkan pengaruh supply dan demand produk tersebut. Di saat produk melimpah yaitu pada saat panen, harga akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Jika supply produk kurang sedangkan permintaan besar maka harga akan mengalami kenaikan. Harga akan stabil apabila peternak dapat memprogramkan produk agar tidak over di pasaran tetapi juga tidak sampai pasar kekurangan stok.

**e. *Serangan Penyakit***

Penyakit AL ( Avian influenza) yang menyerang unggas, serta menyebabkan merosotnya produk asal ternak ayam yang berupa telur maupun daging. Penyakit ternak yang berdampak cukup besar seperti Brucellosis dan Anthrax yang menyerang ternak sapi juga menimbulkan kerugian bagi petani peternak.

**f. *Lemahnya Kelembagaan Kelompok Tani***

Kelembagaan kelompok tani peternak dan pembudidaya ikan sebagian besar masih lemah, organisasi yang telah dibentuk dan berjalan kurang terkoordinasi, banyak tidak dilaksanakan pencatatan sehingga kemajuan yang dicapai tidak terbaca dengan jelas.

**2. Analisis Strategis**

Berdasarkan hasil analisa lingkungan faktor internal dan eksternal, maka ditetapkan strategi pembangunan peternakan dan perikanan tahun 2021-2026 sebagai berikut :



### **2.1. Strategi (Strengths-Opportunities)**

Strategi Pembangunan Peternakan dan Perikanan tahun 2021-2026 berdasarkan **analisis Kekuatan (Strengths)** dan **Peluang (Opportunities)** adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan Kelembagaan Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai Instansi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal;
2. Pengkajian dan penerapan teknologi peternakan yang mampu mengoptimalkan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak.

### **Strategi (Weakneses-Opportunities)**

Strategi Peternakan dan Perikanan tahun 2021-2026 berdasarkan hasil **analisis Kelemahan (Weakneses)** dan **Peluang (Opportunities)** adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan sumberdaya manusia peternak dan pembudidaya ikan;
2. Peningkatan Pengawasan bahan asal Hewan (BAH);
3. Pengembangan Sumberdaya Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan yang peka terhadap perkembangan informasi peternakan dan perikanan.

### **3.3. Strategi (Strengths-Threats)**

Strategi pembangunan peternakan dan perikanan tahun 2021-2026 berdasarkan hasil **analisis Kekuatan (Strengths)** dan **Ancaman (Threats)** adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Kepastian Hukum melalui penegakan peraturan sebagai bentuk pelayanan publik di bidang peternakan dan perikanan untuk keamanan berusaha;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembanguana peternakan dan perikanan.

### **3.4. Strategi (Weakneses-Threats)**



Strategi pembangunan peternakan dan perikanan tahun 2021-2026 berdasarkan hasil **analisis Kelemahan (Weakneses)** dan **Ancaman (Threats)** adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan;
2. Penguatan Kelembagaan Kelompok Peternak dan Pembudidaya Ikan;
3. Pengembangan jaringan informasi pasar produk hasil peternakan dan perikanan;
4. Pemberdayaan pelaku usaha peternakan dan perikanan terhadap pengendalian lingkungan;
5. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
6. Pemetaan Potensi peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan kawasan produksi peternakan dan perikanan.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat dirumuskan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Sumberdaya peternak dan pembudidaya ikan;
2. Pengkajian dan penerapan teknologi peternakan dan perikanan yang mampu mengoptimalkan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak;
3. Pengembangan jaringan informasi pasar produk hasil peternakan dan perikanan;
4. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan;
5. Peningkatan Pengawasan bahan asal hewan (BAH);
6. Pemetaan potensi peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan kawasan produksi peternakan dan perikanan;
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan peternakan dan perikanan;



8. Pemberdayaan pelaku usaha peternakan dan perikanan terhadap pengendalian lingkungan;
9. Pemantapan kelembagaan Dinas peternakan dan perikanan sebagai instansi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal;
10. Peningkatan sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan;
11. Pengembangan Sumberdaya Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan yang peka terhadap perkembangan informasi peternakan dan perikanan;
12. Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan sebagai bentuk pelayanan publik di bidang peternakan dan perikanan untuk keamanan berusaha.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Pembangunan Kota Sungai Penuh berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2021– 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah untuk bidang urusan pertanian adalah :

***Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing, dan meningkatkan perekonomian Kota Sungai Penuh yang merata dan inklusif***

Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka sasaran pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 – 2026 dalam memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah untuk bidang urusan Pertanian yaitu :

***“Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan”.***

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sungai Penuh diatas, untuk mencapai sasaran daerah dalam meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan perikanan maka Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tujuan dan sasarannya yaitu :

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

#### Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Sungai Penuh adalah :

1. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan



2. Meningkatkan Produksi Pengolahan Hasil perikanan
3. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan di Dinas Peternakan dan Perikanan
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan mengayomi di Dinas Peternakan dan Perikanan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Produksi Peternakan
2. Meningkatnya Total Produksi perikanan (tangkap dan Budidaya)
3. Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan
4. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan
5. Meningkatnya Kapasitas dan manajemen Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan yang akan dicapai pada tahun 2021.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut



TABEL TC-25

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA SUNGAI PENUH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan</b>	<b>Jumlah Produksi Ternak : 1. Ternak (Ton) 2. Ikan ( Ton)</b>	Meningkatnya Produksi peternakan	Pertumbuhan produksi peternakan	Jumlah Produksi Thn n - jumlah produksi thn n-1 /jumlah produksi thn n-1 * 100 (%)	2,20	3,37	2,70	2,20	3,30	2,70
			Meningkatnya Total Produksi perikanan (tangkap dan Budidaya)	'Pertumbuhan produksi Perikanan	Jumlah Produksi Thn n - jumlah produksi thn n-1 /jumlah produksi thn n-1 * 100 (%)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00



2	Meningkatkan Produksi Pengolahan Hasil perikanan	Pertumbuhan produksi Pengolahan Perikanan (%)	Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan	'Pertumbuhan produksi Pengolahan Perikanan (%)	'Jumlah produksi Pengolahan perikanan Thn n - produksi Pengolahan perikanan thn n-1 /jumlah produksi Pengolahan perikanan thn n-1 * 100 (%)	13.46	14.00	15.38	15.00	14.49	9.49
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan dari Inspektorat	B	B	BB	BB	A	A
4	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan mengayomi di Dinas Peternakan dan Perikanan	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Peternakan dan Perikanan	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Peternakan dan Perikanan	Rendah	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Adapun strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pembangunan peternakan dan perikanan, kemudian pendekatan komprehensif juga merupakan strategi yang digunakan untuk sarana melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja penyelenggara pembangunan peternakan dan perikanan.

Disamping itu strategi dan arah kebijakan bukan saja menyangkut dengan aktivitas pembangunan fisik semata, tetapi juga dapat mendukung pelaksanaan program pelayanan masyarakat, peningkatan mutu, pelaksanaan manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Dari kondisi umum dan potensi yang dimiliki Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan pembangunan peternakan dan perikanan Kota Sungai Penuh untuk lima tahun kedepan yang dapat mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel T.C 26 dibawah ini :



**TABEL T.C 26**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI :</b>		<b>Terwujudnya Kota Sungai Penuh Menjadi Kota Pendidikan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri, Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Sejahtera”</b>		
<b>MISI :</b>		<b>Memantapkan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
1. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan	1.1. Meningkatnya Produksi peternakan	1.1.1. Meningkatkan Efektifitas Program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Andalan Dalam Negeri)	1.1.1.1	Peningkatan Populasi melalui pengembangan mutu genetik dan benih komoditas unggulan
		1.1.2. Membangun Sarana dan Prasarana Perbibitan ternak	1.1.2.1	meningkatkan sinegitas seluruh komponen masyarakat Peternakan, aparatur dan pelaku usaha peternakan
			1.1.2.2	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak
			1.1.2.3	Mengoptimalkan pembangunan dan meningkatkan manajemen unit perbibitan ternak
			1.1.2.4	Menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Insensinasi Buatan selalu dalam Keadaan Cukup (Penyediaan Straw, Hoormon, Nirogen Cair dan Container)



			1.1.2.5	Penguatan Insentif bagi Petugas Inseminator
		1.1.3. Meningkatkan Mutu dan pengendalian serta Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak	1.1.3.1	Melakukan Pembinaan pada Poultry shop dan Kelompok Tani ternak
		1.1.4. Mejamin ketersediaan Peredaran benih/bibit ternak	1.1.4.1	Pengadaan Induk dan Bibit unggul untuk Unit Perbibitan Ternak
			1.1.4.2	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat
		1.1.5. Memaksimalkan pembuatan pakan Lokal yang berkualitas	1.1.5.1	Meningkatkan Sosialisasi Pemanfaatan Jerami Sebagai Pakan Ternak
			1.1.5.2	Memfasilitasi Teknologi Alat dan Mesin Pakan Ternak
		1.1.6. Mengembangkan dan melakukan pembinaan terhadap produktifitas kelompok Peternakan	1.1.6.1	meningkatkan dan menyediakan prasarana pemasaran produk hasil peternakan dan perikanan
		1.1.7. Membangun Prasarana dan Sarana pemasaran produk peternakan dan Layanan Unit-unit Pelaksana Teknis Daerah	1.1.7.1	Penyediaan Pasar Ternak yang Refresentatif
			1.1.7.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD RPH dan UPTD Puskesmas
			1.1.7.3	Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT)
	1.2. Meningkatnya Total Produksi perikanan (tangkap dan Budidaya)	1.2.1. Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.2.1.1	Meningkatkan kapasitas Balai Benih ikan (BBI) dalam penyediaan bibit baik kualitas maupun kuantitas



			1.2.1.2	Menyediakan Sarana dan Prasarana UPTD BBI
		1.2.2. Meningkatkan Sumberdaya Manusia pembudidaya ikan melalui IPTEK perikanan	1.2.2.1	Menyediakan Laporan perkembangan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan
			1.2.2.2	Menyediakan Sarana dan Prasarana UPTD BBI
			1.2.2.3	Memfasilitasi Pembentukan Kampung Ikan
			1.2.2.4	Membuat Pakan Alternatif / Pakan Alami
		1.2.3. Meningkatkan pembinaan kelompok disektor peternakan dan Perikanan	1.2.3.1	Mengaktifkan Kolam / potensi lahan perikanan yang tidak produktif pada Kelompok Budidaya Ikan
			1.2.3.2	Memfasilitasi Potensi Sumber Air untuk Budidaya Ikan
			1.2.3.3	Memfasilitasi Pembentukan Pembudidaya ikan Milenial
			1.2.3.4	Melakukan Penambahan Indukan yang unggul dan Bersertifikat
			1.2.3.5	Mengoptimalkan operasional Balai Benih Ikan secara terpadu
		1.2.4. Pengembangan kawasan perikanan Tangkap dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Lubuk Larangan	1.2.4.1.	Memanfaatkan genangan Air Pasca Banjir untuk areal Budidaya Ikan
		1.2.5. Peningkatan Sumber Daya Manusia peluka usaha pembudidaya	1.2.5.1	Melaksanakan Pelatihan Kepada Kelompok POKLATSAR (Pengolahan dan Pemasar)
			1.2.5.2	Memfasilitasi Kelompok dalam Kepengurusan Perizinan Unit Pengolahan Ikan



		1.2.6. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Peternak melalui IPTEK Peternakan	1.2.6.1	peningkatan kapasitas kelompok melalui penerapan iptek
		1.2.7. Meningkatkan kapasitas SDM petugas Kesmavet	1.2.7.1	Melaksanakan Pelatihan Petugas IB, PKB dan ATR
			1.2.7.2	Pelatihan Bagi Petugas
			1.2.7.3	Menambah Petugas Insensinator Baru
		1.2.8. Meningkatkan Pengelolaan PAD	1.2.8.1	
		1.2.9. Mejamin ketersediaan Produk pangan asal ternak dan ikan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	1.2.9.1	Meningkatkan pengendalian penyakit asal ternak dan ikan
			1.2.9.2	Meningkatkan kapasitas SDM petugas Kesmavet
		1.2.10 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Kesehatan Ternak/Hewan Peliharaan	1.2.10.1	Sosialisasi dan Pembinaan Ke Masyarakat Tentang Pemeliharaan Ternak yang Baik
		1.2.11. Meningkatkan kapasitas SDM petugas Kesmavet	1.2.11.1	Penambahan Petugas Penjagal / Pelatihan Bagi Petugas Huru Sembelih Halal (JULEHA)
			1.2.11.2	Memfasilitasi dan mendorong pemotongan ternak di RPH
		1.2.12. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Tenaga Kesehatan Hewan (Dokter Hewan dan Para Medis)	1.2.12.1.	Penambahan Tenaga Medik dan Paramedik Veteriner
		1.2.13. Membangun Kerjasama kemitraan pemasaran produk peternakan dan perikanan	1.2.13.1	Memfasilitasi Kepengurusan Izin Usaha Unit Pengolahan Hasil Peternakan



		1.2.14. Mejamin ketersediaan Produk pangan asal ternak dan ikan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	1.2.14.1	Mengefektifkan Pameran sebagai ajang memperkenalkan produk hasil Peternakan
			1.2.14.2	Sosialisasi dan Pembinaan kepada Masyarakat dan Pedagang Pangan Asal Hewan
			1.2.14.3	Pembinaan terhadap Pelaku usaha toko obat-obatan / Poultry Shop dala hal penjualan obat hewan kepada Masyarakat
			1.2.14.4	Pemberian Penghargaan terhadap toko obat hewan/Petshop yang telah memenuhi ketentuan / prosedur penjualan obat-obatan hewan dalam bentuk piagam penghargaan
2. Meningkatkan Produksi Pengolahan Hasil perikanan	2.1. Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan	2.1.1. Membangun Kerjasama kemitraan pemasaran produk perikanan	2.1.1.1	Memperluas Jaringan Pemasaran Hasil Produk hasil Perikanan
		2.1..2. Meningkatnya Pengolahan Hasil Peternakan Perikanan	2.1.2.1	Meningkatkan produk olahan hasil perikanan
			2.1.2.2	Meningkatkan motivasikonsumsi ikan masyarakat
			2.1.2.3	Meningkatkan monitoring produk perikanan yang beredar di pasaran
			2.1.2.4	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan



			2.1.2.5	Meningkatkan kualitas kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil perikanan
3. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan di Dinas Peternakan dan Perikanan	3.1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan	3.1.1 Meningkatnya Penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan Pelaporan SKPD	3.1.1.1	meningkatkan kualitas perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat
		3.1.1. Pemanfaatan teknologi data dan informasi	3.1.1.2	meningkatkan kualitas perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan mengayomi di Dinas Peternakan dan Perikanan	4.1. Meningkatnya Kapasitas dan manajemen Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan	4.1.1. peningkatan disiplin kerja aparatur	4.1.1.1	Mengefektifkan pelayanan diklat kantor sendiri
		4.1.2. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sesuai peran dan fungsi	4.1.2.1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan yang Profesional (Kompetensi Birokrasi) Serta Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan
		4.1.3. Mendorong pengembangan sumberdaya masyarakat peternakan melalui good farming practice	4.1.3.3	peningkatan proses atau teknik budidaya yang baik untuk skala usaha peternakan
		4.1.4. Pengembangan sumberdaya masyarakat melalui iptek peningkatan peternakan dan perikanan	4.1.4.1	Peningkatan kapasitas kelompok melalui penerapan iptek



		4.1.5. Mendorong pengembangan sumberdaya masyarakat peternakan melalui good farming practice	4.1.5.1	Peningkatan proses atau teknik budidaya yang baik untuk skala usaha perikanan
		4.1.6. Pengembangan sumberdaya masyarakat melalui IPTEK peningkatan peternakan dan perikanan	4.1.6.1	Peningkatan kapasitas kelompok melalui penerapan iptek



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, yaitu:

1. PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
2. PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
5. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Berikut disajikan pada **tabel T-C.27** Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026.



**Tabel T-C. 27**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Kode	Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Peninggungan-jawab	Lokasi
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan	Jumlah Produksi Peternakan dan Perikanan (Ton)	Meningkatnya Produksi peternakan	Pertumbuhan produksi peternakan	Jumlah Produksi Thn n - jumlah produksi thn n-1 /jumlah produksi thn n-1 * 100 (%)		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi ternak	821.61	839.69	11,986,350	867.40	61,042,437	890.81	62,995,101	910.41	65,584,024	940.46	68,119,944	965.85	70,547,064	Bid. Peternakan	
							Populasi Ternak Ruminansia :			0		0		0		0		0		0		0



						Sapi	4,559	4787		5026		5278		5541		5819		6109		Bid. Peternakan	
						Kerbau	355	376		395		415		435		457		480			
						Kambing	9381	9662		9952		10251		10558		10875		11201		Bid. Peternakan	
						Domba	2992	3,167		3,262		3,360		3,461		3,564		3,671			
						Unggas :	429.684	547,323		563,743		580,655		598,075		616,017		634,497			
						Itik	49.000	59,045		60,816		62,641		64,520		66,456		68,449		Bid. Peternakan	
						Ayam Buras	380.684	488,278		502,926		518,014		533,555		549,561		566,048			
						Persentase kelompok peternak yang memanfaatkan Bahan Baku lokal sebagai pakan ternak	NA	17.44	40,074,654	18.49	27,114,983	19.78	27,053,538	21.17	27,263,461	22.65	27,443,447	24.23	27,575,922		Bid. Peternakan
					Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	terlaksannya Penggunaan Sarana Peternakan	10 kelompok	NA	10,074,654	14	17,114,983	14	17,053,538	16	17,153,538	18	17,253,538	20	16,367,922		



						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	1	10,074,654	2	17,114,983	2	17,053,538	2	17,153,538	2	17,253,538	2	16,367,922		
							(1) Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Alat Mesin Pengolahan Pakan / Mesin Press Jerami	10	NA	10,074,654	4	7,114,983	4	7,053,538	6	7,153,538	8	7,253,538	10	7,253,538		
							(2) Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Alat Mesin Tetas	NA	NA		10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	9,114,384		
						Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme kewenangan Kab/Kota	Peningkatan Jumlah Ternak (Sapi dan Kambing) EKOR	(1) 690 (2) 700	(1) 725 (2) 735	110,000,000	(1) 761 (2) 772	11,959,947	(1) 799 (2) 810	11,652,273	(1) 839 (2) 851	11,959,947	(1) 881 (2) 893	12,260,922	(1) 925 (2) 938	12,545,945		
						Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	7	7	110,000,000	7	11,959,947	7	11,652,273	7	11,959,947	7	12,260,922	7	12,545,945		



						(1) Terlaksananya Jumlah Kelahiran ternak Hasil IB	690	725	110,000,000	761	11,959,947	799	11,652,273	839	11,959,947	881	12,260,922	925	12,545,945			
						2)Terlaksananya Pembinaan kelompok tani ternak Sapi Potong	24	24	-	32		40		48		56		60				
						(3)Terlaksananya Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)	940	960	-	980		986		992		998		1,000				
						4) Terlaksananya Jumlah induk Produktif yang di IB	1200	1,280	-	1,400		1,512		1,670		1,780		1,800				
						(5) Tersusunnya informasi dan data Statistik Peternakan	4 laporan	4	-	4		4		4		4		4				
						(6) Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana IB	Na	Na	-	10		10		10		10		10				
						(6) terlasannya Pelatihan bagi Inseminator	Na	Na	-	2		2		2		2		2				
						(7) Terlasannya Sinkronisasi Birahi, PKB dan ATR	1	1	-	2		2		2		2		2				



					Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemanfaatan bahan baku Sebagai Pakan Ternak bagi kelompok	10	10	30,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,109,923	10	10,189,909	10	11,208,000		
					Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	1	30,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,109,923	1	10,189,909	1	11,208,000		
						(1) terlaksnnaya Pembinaan Pemanfaatan teknologi Pakan Ternak bahan Baku lokal jerami (frekuensi/kali)	12	31 kali	30,000,000	96	10,000,000	101	10,000,000	120	10,109,923	143	10,189,909	170	11,208,000.00		
						(2) Terlaksananya Sosialisasi dan pelatihan Bagi Kelompok	Na	4		6		8		8		8		6			
						(3) Tersediannya Mesin Pres Jerami	Na	NA		2		2	-	2	-	2	-	2			







					Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	2	2	10,000,000	2	21,042,437	2	21,795,101	2	23,766,024	2	25,047,404	2	25,753,744		
						(1) Terlaksannya Pengawasan Bibit Ternak	8	NA	5,000,000												
						(2) Terlaksannya Pembinaan peningkatan produksi budidaya ternak pada kelompok ternak	8	NA	5,000,000	12	21,042,437	18	21,795,101	27	23,766,024.00	41	25,047,404	61	25,753,744.12		
					Penjaminan Peredaran HPT bahan pakan / Pakan	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan			-		20,000,000		20,600,000		20,806,000		21,430,180		22,501,689		
						(1) Terlaksananya Pemantauan Stok Pakan dan Bahan Pakan di Pasaran			0	24 kali	20,000,000	24 kali	20,600,000	24 kali	20,806,000	24 kali	21,430,180	24 kali	22,501,689		
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan	36	39	0	42	-	47	600,000,000	51	500,000,000	56	150,000,000	62	150,000,000		Bid. Peternakan



						Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Peternakan dan Rehabilitasi Sarpras Rumah Potong Hewan Serta Tersediannya Prasarana Pertanian Lainnya	NA	NA	-	2 Unit	-	2 Unit	575,000,000	2 Unit	450,000,000	2	125,000,000	5 Unit	125,000,000		
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan (UNIT)	1	1		1		2	400,000,000	7	400,000,000	2	125,000,000	2	25,000,000		
							(1)Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi Instalasi Pengelolaan Limbah(IPAL)	NA	NA	0			1 Unit	200,000,000		-	1 Unit	-	1 Unit	-		
							(2)Terlaksananya Peningkatan Ruang Pemotongan RPH	NA	NA	0			1 Paket	200,000,000		-	1 Paket	-	1 Paket	-		
							(3)Terlaksananya Peningkatan Jalan, Parkir dan Halaman RPH	NA	NA	0		-	1 Paket		1 Paket	200,000,000	1 Paket	-	1 Paket	-		
							(4)Tersediannya Dukungan dan sharing DAK Pertanian sub bidang peternakan	NA	NA	0		-		-	6 Paket	200,000,000	6 Paket	-	6 Paket	-		





						(4) Terlaksananya Peralatan Peternakan	NA	NA	0	1 Paket		1 Paket	-	1 Paket	50,000,000	1 Paket	-	1 Paket	-		
						(5) Tersedianya tanah untuk Perluasan Pasar Ternak	NA	NA	-	0,5 Ha		0,5 Ha		0,5		-	-	-			
						Tersedianya Dana DAK Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan	NA	NA	0	6 Paket	-	6 Paket	1,500,000,000	6 Paket	1,000,000,000	6 Paket	1,500,000,000	6 Paket	1,700,000,000		
					Kegiatan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan umum yang di Kembangkan	NA	NA	0	0,5 Ha	-	0,5 Ha	25,000,000	0,5 Ha	50,000,000	0,5 Ha	25,000,000	0,5 Ha	25,000,000		
					Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Terkelolanya Lahan Pengembalaan Umum	Na	Na	-	0,5	-	0,5	25,000,000	0,5	25,000,000	0,5	25,000,000	0,5	25,000,000		
						Terlaksananya pengadaan bibit HMT	NA	NA	0	0,5 Ha		0,5 Ha	25,000,000								
						Tersedianya Mesin Pengolahan Pakan Ternak (unit)	NA	NA	0	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit			



			Pertumbuhan produksi Perikanan	Jumlah Produksi Thn n - jumlah produksi thn n-1 / jumlah produksi thn n-1 * 100 (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	5	5.00	615,443,426	5.25	114,147,807	5.51	117,443,426	5.79	119,833,051	6.08	122,081,371	6.38	130,096,367	Bid. Perikanan
						Jumlah Total Produksi Perikanan budidaya	224.36	235.58	169,719,932	247.36	29,310,690	259.73	29,005,890	272.71	31,089,651	286.35	33,185,640	300.67	29,266,893	Bid. Perikanan
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tingkat Cakupan bina kelompok pembudidayaan ikan (%)		22.22	615,443,426	23.33	114,147,807	24.50	117,443,426	25.72	119,833,051	27.01	122,081,371	28.36	130,096,367	
						Jumlah Produksi Benih ikan (ekor)	Na	2,323,210	169,719,932	2,439,370	29,310,690	2,561,339	29,005,890	2,689,405	31,089,651	2,823,875	33,185,640	2,965,069	29,266,893	
					Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	0	1	10,000,000	1	8,500,000	1	10,550,000	1	11,705,000	1	12,975,500	
						tersedianya Data dan Informasi Perikanan	1 Dok	NA	NA	1 Dok	10,000,000	1 Dok	8,500,000	1 Dok	10,550,000	1 Dok	11,705,000	1 Dok	12,975,500	











						Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan wilayah sungai dan genangan air	2	2	3,995,450	2	5,544,290	2	5,659,877	3	5,832,761	3	6,000,657	3	6,158,967			
							Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2	2	3,995,450	2	10,395,543	2	10,612,269	3	10,936,428	3	11,251,233	3	11,548,062			
						Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3	4	7,990,900	5	15,939,833	5	16,272,146	6	16,769,189	7	17,251,890	7	17,707,029			
							Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	Na	Na	3,995,450	1	10,395,543	2	10,612,269	2	10,936,428	2	11,251,233	2	11,548,062			
							Tersedianya Benih Ikan untuk restocking	Na	Na		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		
							Jumlah Kelompok yang dibina pada kelompok Usaha Bersama di wilayah Perairan Umum	2	2	3,995,450	3	5,544,290	3	5,659,877	3	5,832,761	3	6,000,657	3	6,158,967			



			'Pertumbuhan produksi Pengolahan Perikanan (%)	Jumlah produksi Pengolahan perikanan Thn n - produksi Pengolahan perikanan thn n-1 /jumlah produksi Pengolahan perikanan thn n-1 * 100 (%)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	33.84	34.86	42,266,499	35.90	42,423,322	36.98	42,640,654	38.09	43,901,499	39.23	45,002,141	40.41	45,896,091	Bid. Perikanan
						Produksi Olahan Produk Perikanan	79	90	46,493,148	104	29,305,926	120	30,584,003	138	31,559,852	158	32,631,364	173	32,785,538	Bid. Perikanan
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persenase POKLATSAR ikan yang mengikuti Pelatihan		34	40,493,148	34	23,305,926	37	23,584,003	39	24,559,852	41	25,631,364	43	27,785,538	
						Terbitnya rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dan usaha hasil perikanan di bidang Perikanan	NA	2	6,000,000	2	6,000,000	2	7,000,000	4	7,000,000	4	7,000,000	4	5,000,000	
					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		34	46,493,148	34	29,305,926	35	30,584,003	36	31,559,852	37	32,631,364	38	32,785,538	



						(1) Terlaksananya Bimbingan teknis usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Na	8 kali	40,493,1 48	8 kali	23,305,9 26	8 kali	23,584,0 03	8 kali	24,559,8 52	8 kali	25,631 ,364	8 kali	27,785 ,538
						2) terlaksananya bimtek usaha Pengolahan hasil perikanan	Na	Na				30		30		30		30	
						(3) Terlaksananya Pembinaan Rekomendasi perizinan		2	6,000,00 0	2	6,000,00 0	4	7,000,00 0	4	7,000,00 0	4	7,000, 000	2	5,000, 000
						Terlaksananya Pembinaan kelompok POKLATSAR		8		8		9		9		10		10	
						Terlaksananya Pelatihan Kepada Kelompok POKLATSAR (Pengolahan dan Pemasar)	30	Na		30		30		30		30		30	
						Terlaksananya Bimbingan teknis pengolahan pakan ikan	Na	Na		30%		30%		20%		15%		5%	
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Bahan Baku Produk Pengolahan ikan (Jenis)	7 Jenis	7 Jeni s	42,266,4 99	8 Jenis	42,423,3 22	8 Jenis	42,640,6 54	8 Jenis	43,901,4 99	9 Jenis	45,002 ,141	9 Jeni s	45,896 ,091



					Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	79	90	42,266,499	104	42,423,322	120	42,640,654	138	43,901,499	158	45,002,141	173	45,896,091		
						(1) Terlaksananya Bazar	8 Kali	8 Kali	42,266,499	8 Kali		8 Kali	-	8 Kali	-	8 Kali	45,002,141	8 Kali	45,896,091		
						Terlaksananya Gemarikan	1 kali	1 kali		6 Kali	42,423,322	6 Kali	42,640,654	6 Kali	43,901,499	6 Kali		6 Kali		6 Kali	
						Terlaksananya kegiatan Promosi produk dan hasil olahan ikan	7 Jenis	7 Jenis		8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	9 Jenis	9 Jenis						
						Terlaksananya Pameran, pekan harmoni, lomba masak, promosi hari nusantara, jambore	3 Kali	3 Kali		3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali					
					Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	2 paket	2 paket	2 paket									



						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (IKK Outcome)	-11%	-9%	109,681,897	-7%	218,306,408	-5%	229,157,919	-3%	230,068,706	-2%	236,692,861	-1%	242,794,528	BIDANG KESWAN	
							Produksi Olahan Produk Peternakan	1,500	1,545	340,973,274	1,591	194,136,770	1,639	191,883,462	1,688	203,834,062	1,739	199,699,794	1,791	205,374,843	BIDANG PETERNAKAN DAN KESWAN	
						Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya tindakan Medis dan Pengobatan dan Vaksinasi Ternak (ekor)	750 ekor/2500 dosis	750 ekor/2500 dosis	60,000,000	800 ekor/3500 dosis	80,000,000	1000 ekor/4500 dosis	83,000,000	1000 ekor/5500 dosis	83,000,000	1150 ekor/5500 dosis	87,000,000	1200 ekor/5500 dosis	90,000,000		
							Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	0	70	44,681,897	75	108,306,408	80	113,157,919	85	113,568,706	90	115,692,861	95	117,794,528		
						Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis	8	8	44,681,897	8	108,306,408	8	113,157,919	8	113,568,706	8	115,692,861	8	117,794,528		
							(1) Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Hewan	1 paket	1 paket	44,681,897	1 paket	108,306,408	1 paket	113,157,919	1 paket	113,568,706	1 paket	115,692,861	1 paket	117,794,528		







						Persentase Ketersediaan Produk Asal Ternak yang ASUH di UPTD RPH	60	65	90,000,000	70	30,136,770	75	33,144,576	80	38,221,288	85	31,174,764	88	33,879,313		
						Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	3	2	90,000,000	2	30,136,770	2	33,144,576	2	38,221,288	2	31,174,764	2	33,879,313		UPTD RPH
						(1)Terbitnya Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) tipe C Rumah Potong Hewan	NA	NA		1		1		1		1		1			
						(2)Terlaksananya pengawasan terhadap Tempat Pemotongan Hewan(TPH)/ Masyarakat	12 kali	12 kali	90,000,000	12 kali	30,136,770	12 kali	33,144,576	12 kali	38,221,288	12 kali	31,174,764		33,879,313		
						(3) Tercapainya Target PAD dari RPH	26,000,000	50,000,000		35,000,000		40,000,000		50,000,000		52,000,000					
						Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2	2	-	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000		



						Terlaksananya Pengelolaan Pasar ternak Sungai Sirah	NA	1 Tahun	-	1 Tahun	20,000,000									
						Terlaksananya bimbingan teknis Pemasaran ternak		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		20,000,000		
						Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 Sample	150 Sample	5,000,000	200 sample	30,000,000	210 sample	33,000,000	225 Sample	33,500,000	250 Sample	34,000,000	270 Sample	35,000,000	
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2	2	5,000,000	2	30,000,000	2	33,000,000	2	33,500,000		34,000,000		35,000,000	UPTD PUSKESWAN
						Terlaksananya Pembayaran Jasa Tindakan Medik Veteriner Terlaksananya Pengujian Sampel darah dan feses	12 bulan	12 bulan	5,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	33,000,000	12 bulan	33,500,000	12 bulan	34,000,000	12 bulan	35,000,000	
						Tersediannya Operasional DAK Non Fisik PUSKESWAN	Na	Na		5 Paket		6 Paket		6 Paket		7 Paket		7 Paket		



						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis Produk Olahan Peternakan (jenis)	10 Jenis	10 Jenis	140,000,000	10 Jenis	72,000,000	10 Jenis	70,000,000	10 Jenis	70,000,000	10 Jenis	71,400,000	10 Jenis	72,828,000		
							Terkendalanya Keamanan Pangan Asal Hewan ( PAH) dan produk olahan asal Hewan	30	33	110,973,274	36	72,000,000	40	68,738,886	44	75,612,774	48	77,125,030	53	78,667,530		
						Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	6	6	140,000,000	6	72,000,000	6	70,000,000	6	70,000,000	6	71,400,000	6	72,828,000	BIDANG PETERNAKAN	
							(1) Memfasilitasi MOU Perjanjian dalam Pemasaran Produk	1 kali					2		4		6		8			
							(1) Memfasilitasi MOU Perjanjian dalam Pemasaran Produk	1 kali		140,000,000		72,000,000	2		4		6		8		72,828,000	
							(2)Terlaksananya lomba agribisnis peternakan	3 Katagori	3		3		4		4		4		4			
							(3)terlaksananya Pembinaan pendampingan dan pelatihanPengolahan hasil Ternak	4 Kali	24		24		30		36		42		48			





						(4) Terlaksananya Sosialisasi ASUH	1 kali	1 kali														
						5) Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Peternakan (Ayam, Ikan dan Daging)	30 pedagang	30 pedagang														
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	246,654,000	100	271,559,800	100	298,715,780	100	328,587,358	100	361,446,093	100	397,590,703			
						Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, Administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,489,325,663	100	3,288,374,892	100	2,471,488,964	100	2,498,445,622	100	2,513,755,683	100	2,513,460,721			
						Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	100	170,000,000	100	266,000,000	100	1,101,000,000	100	1,158,900,000	100	1,221,490,000	100	1,289,239,000			
						Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100	100	-	100	-	100	35,513,689	100	40,222,803	100	45,474,540	100	51,286,968			



			Indeks Profesionalitas ASN Dinas Peternakan dan Perikanan	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Peternakan dan Perikanan		Persentase Aparatur yang berkinerja baik	100%	100%	52,137,809	100%	42,000,000	100%	39,862,596	100%	42,510,809	100%	66,865,484	100%	69,387,632		
						Persentase Aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, bimtek	25%	30%	73,453,899	35%	71,222,896	35%	74,700,000	40%	75,447,000	50%	54,370,067	50%	54,913,768		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja SKPD	100	100	246,654,000	100	271,559,800	100	298,715,780	100	328,587,358	100	361,446,093	100	397,590,703		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3	100,818,000	3	110,899,800	3	121,989,780	3	134,188,758	3	147,607,633	3	162,368,397		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	51,700,000	4 Dok	56,870,000	4 Dok	62,557,000	4 Dok	68,812,700	4 Dok	75,693,970	4 Dok	83,263,367		



						- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA dan DPA Perubahan-SKPD															
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	8	27,054,000	8	30,000,000	8	33,000,000	8	36,300,000	8	39,930,000	8	43,923,000		
						Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD (LKj-IP, LKPJ, LPPD, IKU, Cascading, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	8 Dok	8 Dok													
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	67,082,000	2	73,790,000	2	81,169,000	2	89,285,900	2	98,214,490	2	108,035,939		



						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Bakeuda Kota Sungai Penuh	100	100	3,161,492,043	100	2,928,149,972	100	2,085,699,552	100	2,085,058,169	100	2,070,559,431	100	2,027,415,606		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14	2,955,492,043	14	2,710,349,972	14	1,848,975,552	14	1,827,746,249	14	1,790,847,558	14	1,723,330,283		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 DOK	12 DOK	70,000,000	12 DOK	75,000,000	12 DOK	82,500,000	12 DOK	90,750,000	12 DOK	99,825,000	12 DOK	109,807,500		
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 DOK	12 DOK	136,000,000	12 DOK	142,800,000	12 DOK	154,224,000	12 DOK	166,561,920	12 DOK	179,886,873	12 DOK	194,277,823		





						- Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) - Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun - Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang direkonsiliasi dan disusun														
					Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Peternakan dan Perikanan	100	100	-	100	-	100	35,513,689	100	40,222,803	100	45,474,540	100	51,286,968	
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	100	-	100	-	100	35,513,689	100	40,222,803	100	45,474,540	100	51,286,968	
						Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Peternakan dan Perikanan														



					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100	100	115,591,708	100	113,222,896	100	114,562,596	100	117,957,809	100	121,235,551	100	124,301,400		
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	10,000,000	1		1		1	25,880,405	1	-	1	-		
						Meningkatnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37	37	42,137,809	60	42,000,000	65	39,862,596	65	-	65	50,068,776	65	52,422,957		
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapannya	37	37		60		65		65		65		65			
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2				2		2	16,630,404	2	16,796,708	2	16,964,675		





					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	12	12,377,200	12	13,614,920	12	14,976,412	12	16,474,053	12	18,121,458	12	19,933,604		
						Tersedianya Logistik Kantor Tersedianya Makan dan Minum															
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	10	10	16,500,000	10	18,150,000	10	19,965,000	10	21,961,500	10	24,157,650	10	26,573,415		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	4	11,000,000	4	12,100,000	4	13,310,000	4	14,641,000	4	16,105,100	4	17,715,610		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	40	175,000,000	40	183,750,000	40	192,937,500	40	202,584,375	40	212,713,593	40	233,984,953		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100	105,000,000	100	90,000,000	100	907,000,000	100	945,200,000	100	986,220,000	100	1,030,342,000		



						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit				1	370,000,000	1	370,000,000	1	370,000,000	1	370,000,000	
						Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	10	10	25,000,000	10	50,000,000	10	55,000,000	10	65,000,000	10	75,000,000	10	85,000,000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	10	10	80,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000	10	44,000,000	10	48,400,000	10	53,240,000
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	1	1	-	1	5	242,000,000	5	266,200,000	5	292,820,000	5	322,102,000	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	86,956,420	100	97,410,000	100	105,880,500	100	115,134,525	100	125,247,251	100	136,301,213



						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	50	24,200,0 00		25,410,0 00		26,680,5 00		28,014,5 25		29,415 ,251	-	30,886 ,013		
							Terpenuhnya Alat Tulis Kantor															
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	22,756,4 20	12	30,000,0 00	12	33,000,0 00	12	36,300,0 00	12	39,930 ,000	12	43,923 ,000		
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	6	20,000,0 00	7	22,000,0 00	7	24,200,0 00	7	26,620,0 00	7	29,282 ,000	7	32,210 ,200		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	20,000,0 00	12	20,000,0 00	12	22,000,0 00	12	24,200,0 00	12	26,620 ,000	12	29,282 ,000		
							Tersedianya Pembayaran Honor Penjaga Kebersihan dan Keamanan Kantor dan Tersedianya Bahan dan Alat- alat Kebersihan															



					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian pemeliharaan barang Milik Daerah	100	100	65,000,000	100	176,000,000	100	194,000,000	100	213,700,000	100	235,270,000	100	258,897,000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	4	50,000,000	4	70,000,000	4	77,000,000	4	84,700,000	4	93,170,000	4	102,487,000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	4	5,000,000	4	6,000,000	4	7,000,000	4	8,000,000	4	9,000,000	4	10,000,000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	4	10,000,000	4	100,000,000	4	110,000,000	4	121,000,000	4	133,100,000	4	146,410,000	



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif di bidang pertanian dan Perikanan, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh yang diharapkan di masa mendatang.

Pada bagian ini akan disajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam **Tabel T-C. 28** dibawah ini :



**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	<b>Pertumbuhan ekonomi</b>	%	-0.14	3.64	3.72	3.8	3.88	3.96	4.04	4.04	
2	<b>Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan</b>	%	1.98	2.57	2.59	2.61	2.63	2.65	2.67	2.67	
3	Pertumbuhan produksi peternakan	%	Na	2.20	3.37	2.70	2.20	3.30	2.70	2.70	
4	Pertumbuhan produksi Perikanan	Ton	Na	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
5	Pertumbuhan produksi Pengolahan Perikanan (%)	%	Na	13.46	14.00	15.38	15.00	14.49	9.49	9.49	
6	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A	A	



7	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Peternakan dan Perikanan	indeks	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
8	Jumlah Produksi ternak	ton	821.61	839.69	867.4	890.81	910.41	940.46	965.85	965.85
9	Populasi Ternak (Sapi dan Kambing)	Ekor	4559 Sapi/ 9381 Kambing	4787 Sapi/ 9662 Kambing	5026 Sapi/ 9952 Kambing	5278 Sapi/ 10251 Kambing	5541 Sapi/ 10558 Kambing	5819 Sapi/ 10875 Kambing	6109 Sapi/ 11201 Kambing	6109 Sapi/ 11201 Kambing
	Sapi	ekor	4559	4787	5026	5278	5541	5819	6109	6109
	Kerbau	ekor	355	376	395	415	435	457	480	480
	Kambing	ekor	9381	9662	9952	10251	10558	10875	11201	11201
	Domba	ekor	2992	3167	3262	3360	3461	3564	3671	3671
	Itik	ekor	49000	59045	60816	62641	64520	66456	68449	68449
	Ayam Buras	ekor	380684	488278	502926	518014	533555	549561	566048	566048
10	Persentase kelompok peternak yang memanfaatkan Bahan Baku lokal sebagai pakan ternak	%	Na	17.44	18.49	19.78	21.17	22.65	24.23	24.23
11	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan	%	35	39	42	47	51	56	62	62
12	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (IKK Outcome)	%	-11	-9	-7	-5	-3	-2	-1	-1



13	Produksi Olahan Produk Peternakan	ton	1,500	1,545	1,591	1,639	1,688	1,738	1,791	1,791
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>										
14	Persentase Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	%	4.2	5	5.25	5.51	5.79	6.08	6.38	6.38
15	Jumlah Total Produksi Perikanan tangkap (IKK Outcome)	ton	459.01	481.96	506.05	531.36	557.92	585.82	615	615
16	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	%	5	5	5.25	5.51	5.79	6.08	6.38	6.38
17	Jumlah Total Produksi Perikanan budidaya (IKK Outcome)	ton	224.36	235.58	247.36	259.73	272.71	286.35	300.67	300.67
18	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapit a/thn	33.84	34.86	35.9	36.98	38.09	39.23	40.41	40.41
19	Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	79	90	104	120	138	158	173	173
<b>Urusan Pemerintahan</b>										
20	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase ketersediaan laporan capaian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100



22	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	%	0.25	30	35	35	35	40	50	50



Lampiran I : Formula / Devinisi Operasional Dalam Penghitungan Target Dan Capaian Indikator /  
Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Uraian Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Formula dan Devinisi Operasional	Keterangan
Tujuan 1	Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan	Pertumbuhan Total produksi Peternakan dan Perikanan (%)	%	Jumlah Produksi Peternakan perikanan Thn n - jumlah produksi Peternakan perikanan thn n-1 /jumlah produksi Peternakan perikanan thn n-1 * 100 (%)	0-100
Sasaran 1.1	Meningkatnya Produksi peternakan dan Perikanan	1.1.1. Pertumbuhan produksi peternakan	%	Jumlah Produksi Thn n - jumlah produksi thn n-1 /jumlah produksi thn n-1 * 100 (%)  Ket : Akumulasi dari Rata-rata Total Produksi Daging dan Budidaya Sumber : Permendagri 17 Tahun 2021 PERMENTAN No 42 Tahun 2014 Tentang PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK	0-100
		1.1.2. Pertumbuhan produksi Perikanan	%	Jumlah Produksi Thn n - jumlah produksi thn n-1 /jumlah produksi thn n-1 * 100 (%)  Ket :Akumulasi dari Rata-rata Total Produksi Tangkap dan Budidaya Sumber : PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, PERMENDAGRI 18 Tahun 2020	0-100



Tujuan 2	Meningkatkan Produksi Pengolahan Hasil perikanan	Pertumbuhan produksi Pengolahan Perikanan (%)	%	Jumlah produksi Pengolahan perikanan Thn n - produksi Pengolahan perikanan thn n-1 /jumlah produksi Pengolahan perikanan thn n-1 * 100 (%) Ket : Peningkatan Hasil Olahan Perikanan setiap tahunnya.(baik existing maupun baru)	0-100
Sasaran 2.1	Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan produksi Pengolahan Perikanan (%)	%	Jumlah produksi Pengolahan perikanan Thn n - produksi Pengolahan perikanan thn n-1 /jumlah produksi Pengolahan perikanan thn n-1 * 100 (%) Ket : Peningkatan Hasil Olahan Perikanan setiap tahunnya.(baik existing maupun baru) Sumber : PERMENDAGRI 17 Tahun 2021, PERMEN-KP No 5 Tahun 2021 Tentang USAHA PENGOLAHAN IKAN	0-100
Tujuan 3	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan	Kategori	Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permenpan RB Bomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori/Predikat (Nilai) :* AA > 90-100 (Memuaskan)* A > 80-90 (Sangat Baik)* BB > 60-70 (Baik)* CC > 50-60 (Cukup)* C > 30-50 (Kurang)* D > 0-30 (Sangat Kurang)



Sasaran 3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan	Kategori	Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permenpan RB Bomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori/Predikat (Nilai) : * AA > 90-100 (Memuaskan) * A > 80-90 (Sangat Baik) * BB > 60-70 (Baik) * CC > 50-60 (Cukup) * C > 30-50 (Kurang) * D > 0-30 (Sangat Kurang)
Tujuan 4	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional dan mengayomi di Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh	Indeks	Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kategori/Predikat (Nilai) : a. 91 – 100; (Sangat Tinggi) b. 81 – 90; (Tinggi) c. 71 – 80; (Sedang) d. 61 – 70; (Rendah) e. 60 ke bawah. (Sangat Rendah)
Sasaran 4.1	Meningkatnya Kapasitas dan Manajemen Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan kota Sungai Penuh	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh	Indeks	Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kategori/Predikat (Nilai) : a. 91 – 100; (Sangat Tinggi) b. 81 – 90; (Tinggi) c. 71 – 80; (Sedang) d. 61 – 70; (Rendah) e. 60 ke bawah. (Sangat Rendah)



Lampiran II: Formula / Devinisi Operasional Dalam Penghitungan Target Dan Capaian Indikator /

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Uraian Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Formula dan Devinisi Operasional	Keterangan	Target setiap tahun sebagai Acuan
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi ternak	Ton	Jumlah Produksi dalam satu tahun (ton) Sumber : PERMENDAGRI 17 th 2021, PERMENTAN No 42 Tahun 2014 Tentang PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK, Permentan No 26 Thn 2017, Permentan Nomor 06 Tahun 2019;	∞	839,69
03.27.02.2.05	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	(1) Persentase Capaian Penyediaan Benih / Bibit Ternak	%	Jumlah Benih atau Bibit Ternak yang di salurkan / Jumlah Kebutuhan Benih Atau Bibit Ternak X 100 %  Ket : Jumlah Kebutuhan Benih / Bibit Ternak per tahun di dapatkan dari rata-rata / asumsi dari jumlah usulan permohonan bantuan ternak ke pemerintah yang telah di verifikasi baik POKIR DPRD maupun Usulan kelompok melalui Musrenbang.	0 - 100	37
3.27.02.2.05.02	Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Terjaminnya Peredaran Benih/Bibit Ternak	ekor	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Kepmen 050 2021	



		(1)Terlaksananya Pemberian Pengembangan Kelompok penerima bantuan ternak kepada kelompok ternak ( Usulan Masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD )	ekor	Jumlah Ternak yang di salurkan		
		(2)Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan peredaran pakan dan benih/bibit ternak	Klpk	Jumlah kelompok yang di bina		
		3) Terlaksananya Pengadaan Sapi indukan untuk UPT	ekor	Jumlah Ternak sapi indukan yang di adakan		
		(4) Terlaksananya pengadaan ternak itik				
		(5) Terlaksananya pengadaan ternak Ayam buras	ekor	Jumlah Ternak itik yang di adakan		
		<b>(2) Terlaksananya Pengawasan Stok Bibit Ternak/HMT</b>	Kali	Frekuensi Bibit dan Hijauan Pakan ternakn yang di pantauKet : Kegiatan Pengawasan / Pendampingan Kelompok yang mendapatkan Bantuan Ternak Sumber : Permentan No 42/PERMENTAN/OT.140/3/2014 Tentang PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK	∞	32
<b>3.27.02.2.05.06</b>	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kepmen 050 2021	
		(1) Terlaksananya Pendampingan Kelompok Penerima Bibit Ternak	Kelompok	Jumlah Kelompok Ternak yang dilakukan pendampingan		



		(2) Terlaksananya Pembinaan peningkatan produksi budidaya ternak pada kelompok ternak	Kelompok	Jumlah kelompok yang di bina		
3.27.02.2.05.01	Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT bahan pakan / Pakan	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	ton	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Kepmen 050 2021	
		(1) Terlaksananya Pemantauan Stok Pakan dan Bahan Pakan di Pasaran	Kali	Frekuensi Pemantauan Stok Pakan yang beredar		
		<b>3) Terlaksananya Pengadaan HMT</b>	Ha	Jumlah Bibit HMT yang di sediakan	0 - 1	0,5
3.27.02.2.05.01	Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT bahan pakan / Pakan	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	ton	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Kepmen 050 2021	
		(1) Terlaksananya Pemantauan Stok Pakan dan Bahan Pakan di Pasaran		Jumlah Pakan yang beredar		
		Populasi Ternak Ruminansisa	ekor	Jumlah Populasi sapi dan Kambing (ekor) Ket : Akumulasi Peningkatan Populasi Ternak Sapi, kambing dan Kerbau setiap tahunnya. Sumber : PERMENTAN No 42 Tahun 2014 Tentang PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK	∞	
		Sapi	ekor		∞	4.786
		Kerbau	ekor		∞	376
		Kambing	ekor		∞	9.662
		Domba	ekor		∞	3.167
		<b>Unggas</b>		Jumlah Populasi Unggas (ekor) Ket : Akumulasi Peningkatan Populasi Ternak Itik dan Ayam buras setiap tahunnya. Sumber : PERMENTAN No 42 Tahun 2014 Tentang PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK		



		Itik	ekor		∞	59045
		Ayam Buras	ekor		∞	488278
3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme kewenangan Kab/Kota	Peningkatan Jumlah Ternak Ruminasia ( EKOR)	ekor/thn	Jumlah Pertambahan ternak (ekor/thn)Ket : Perhitungan tsb adalah Akumulasi Jumlah Populasi Ternak Ruminasia Sapi, Kerbau dan Kambing pada akhir tahun setelah di kurangi Pemotongan dan ternak keluar	∞	(1) 725 (2) 735
<b>3.27.02.2.02.02</b>	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kepmen 050 2021	
		(1) Terlaksananya Jumlah Kelahiran ternak Hasil IB	ekor	(1) Jumlah Kelahiran ternak Hasil IB		
		2)Terlaksananya Pembinaan kelompok tani ternak Sapi Potong	kelompok	Jumlah Kelompo Peternak yang di bina (kelompok)		
		(3)Terlaksananya Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)	ekor	Jumlah pemeriksaan kebuntingan		
		4) Terlaksananya Jumlah induk Produktif yang di IB	ekor	Jumlah induk Produktif yang di IB		
		( 5)Tersusunnya informasi dan data Statistik Peternakan	Laporan	Jumlah data dan informasi yang di susun		
		(6) Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana IB	Jenis	jumlah Sarana dan Prasarana IB yang di adakan		
		(6) terlasannya Pelatihan bagi Inseminator	orang	Jumlah Petugas IB yang mengikuti pelatihan		
		(7) Terlasannya Sinkronisasi Birahi, PKB dan ATR	kali	Frekuensi Sinkronisasi Birahi,pKB dan ATR(kali)		



		'Persentase kelompok peternak yang memanfaatkan Bahan Baku lokal sebagai pakan ternak	%	Jumlah kelompok yang memanfaatkan bahan baku lokal sebagai pakan ternak / Jumlah kelompok peternak X 100 % Ket : Bahan Baku Lokal mencakup Hasil Olahan Pertanian dan Sisa Hasil Olahan ikan (Jerami,Grid dll) Kebutuhan pakan ternak sapi potong tidak hanya menggunakan hijauan. Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan RB Th 2020	0 - 100	18,49
3.27.02.2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi Peternakan	Kelompok	Jelas	∞	10
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kepmen 050 2021	
		(1) Terlaksannaya Pelatihan Penggunaan Alat Mesin Pengolahan Pakan / Mesin Press Jerami	Kelompok	Jumlah Frekuensi Pendampingan pelatihan yang di laksanakan		
		(2) Terlaksannaya Pelatihan Penggunaan Alat Mesin Tetas	Kelompok	Jumlah Kelompok yang mengikuti pelatihan		
		(3) Terlaksannya Pendampingan kelompok yang memanfaatkan Magot Sebagai Pakan Ternak	kelompok	Jumlah Kelompok Ternak yang memanfaatkan Magot Sebagai Pakan Ternak		



3.27.02.2.03	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya pemanfaatan Jerami Sebagai Pakan Ternak bagi kelompok	Kelompok	Jumlah Kelompok yang memanfaatkan Jerami Sebagai Pakan Ternak	∞	10
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kepmen 050 2021	
		(1) terlaksnnaya Pembinaan Pemanfaatan teknologi Pakan Ternak bahan Baku lokal jerami (frekuensi/kali)	Kali	Frekuensi pembinaan pemanfaatan jerami sebagai pakan ternak		
		(2) Terlaksananya Sosialisasi dan pelatihan Bagi Kelompok	kali	Jumlah Pelatihan yang laksanakan (kali)		
		(3) Tersediannya Mesin Pres Jerami	unit	Jumlah Mesin Pres jerami yang di butuhkan		
		(4) Terlaksannya Study Pembelajaran ke daerah yang memanfaatkan Jerami sebagai pakan ternak	Peserta	Jumlah peserta Kelompok ternak yang mengikuti Studi Pembelajaran		



3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan	%	Jumlah prasarana yang di penuhi dlm 1 tahun/ Total Kebutuhan prasarana X 100 %  Ket : Prasarana UPTD RPH Pasar ternak, UPTD PUSKESWAN dan UPTD Perbibitan Sumber : PERMENTAN NOMOR 101 tahun 2014, Peremntan Nomor 11 tahun 2020 Tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, Permendagri 17 Thn 2021, PERMENTAN Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan	0 - 100	42
3.27.03.2.02	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Peternakan dan Rehabilitasi Sarpras Rumah Potong Hewan Serta Tersediannya Prasarana Pertanian Lainnya	Unit	Jumlah Sarpras Peternakan yang di bangun	∞	2
3.27.03.2.02.07	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan	Unit	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kepmen 050 2021	
		(1)Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Instalasi Pengelolaan Limbah(IPAL)	Unit	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Instalasi Pengelolaan Limbah(IPAL) yang di bangun		
		(2)Terlaksananya Peningkatan Ruang Pematangan RPH	Paket	Jumlah ruang Pematangan yang di tingkatkan		
		(3)Terlaksannya Peningkatan Jalan, Parkir dan Halaman RPH	Paket	Jumlah Sarana Jalan dan halaman parkir yang di bangun		



		(4) Tersedianya Dukungan dan sharing DAK Pertanian sub bidang peternakan	Paket	Jumlah dana dari APBD II di sediakan untuk Dukungan DAK Pertanian		
		(5) Peningkatan / Rehab Kantor UPTD RPH	Paket	Jumlah Unit Kantor RPH yang di di tingkatkan		
		(6) Pembangunan / Rehab Kandang Penampungan / Karentina	Paket	Jumlah Unit Kandang karentina yang di di tingkatkan		
		(7) Tersedianya Dana DAK Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan	Paket	Jumlah Dana DAK yang dibutuhkan		
3.27.03.2.02.09	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Unit	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kepmen 050 2021	
		(1) Peningkatan / Rehabilitas Unit Perbibitan Ternak	Paket	Jumlah Sarana UPTD yang di tingkatkan		
		(2) Terlaksananya pembangunan TURAP dan Pagar kantor UPTD Puskesmas	Paket	Jumlah TURAP dan Pagar PUSKESWAN yang di bangun		
		3) Terlaksananya Pembangunan Pasar ternak Sungai Liuk	Paket	Jumlah Pasar Ternak yang di bangun		
		(4) Terlaksananya Peralatan Peternakan	Paket	Jumlah Peralatan Mesin peternakan yang di butuhkan		
		(5) Tersedianya tanah untuk Perluasan Pasar Ternak	Ha	Luas Tanah yang di butuhkan		
3.27.04.2.04	<b>Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum</b>	<b>Luas Lahan Penggembalaan umum yang di Kembangkan</b>	Ha	Luas Lahan Penggembalaan umum di kembangkan Sumber : Permentan 17 Tahun 2021	∞	0,5
3.27.04.2.04.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum	Ha	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Kepmen 050 2021	



		Terlaksananya pengadaan bibit HMT	Ha	Jumlah Bibit HMT yang ditanam		
		Tersedianya Mesin Pengolahan Pakan Ternak (unit)	Unit	Jumlah Peralatan Mesin Pakan ternak yang di butuhkan		
3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>(1) Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (IKK Outcome)</b>	%	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun n - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun n-1 x 100 % Sumber : Permendagri 17 Thn 2021, PERMENTAN Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan	0 - 100	-7%
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	(1) Terlaksananya tindakan Medis dan Pengobatan dan Vaksinasi Ternak (ekor)	ekor/dosis	Jumlah Ternak Yang di Obati (ekor) dan jumlah Ternak Yang Divaksin (ekor)	∞	800 ekor/3500 dosis
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepmen 050 2021	
		(1)Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi Rabies	Ekor	Jumlah ternak yang di Vaksin Rabies		
		2. Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi SE	Ekor	Jumlah ternak yang di Vaksin SE		
		3)Terlaksananya Pelayanan Kesehatan ternak	orang	Jumlah Pengunjung yang dilayani		
		(4)Terlaksananya Pelayanan Pengujian	Sample	Jumlah Sample yang di uji		



		5)Terlaksananya Pemeriksaan Sampel Pangan Asal Hewan(PAH)	Sample	Jumlah sample PAH yang diambil		
		(6)Terlaksananya Pengobatan Ternak Besar dan Kecil	ekor	Jumlah Ternak yang di obati		
		(7)Terlaksananya Pengambilan Otak Anjing	sample	Jumlah Sample yang diambil		
		<b>(2) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis</b>	%	Jumlah area yang dapat ditanggulangi / Luas area terkena bencana X 100 Sumber : Permendagri	<b>0-100</b>	75
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kepmen 050 2021	
		(1) Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Hewan	Paket	Jumlah Alat dan Mesin Kesehatan Hewan yang di butuhkan		
		2) Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan dan Vaksin	Paket	Jumlah Obat-obatan dan vaksin yang di butuhkan		
		(3)Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Ke Manusia (zoonosis)	Kali	Frekuensi Kelompok Ternak / Pelaku Usaha yang dibina		
		(4)Terlaksananya Pengiriman dan Pemeriksaan Serum Darah dan Feses di Provinsi/Bvet	Sample	Jumlah Pengiriman dan Pemeriksaan di tangani		
		5. Terlaksananya Bimtek Bagi Petugas Kesehatan Hewan	orang	Jumlah Petugas Kesehatan ( Medis dan Paramedis yang mengikuti Pelatihan		
		(8) Terlaksananya Bimtek Bagi Petugas URC (unit reaksi Cepat)penyakit hewan Menular ke manusia Zoonosis	orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek (org)		



3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan Jasa Tindakan medis veteriner dan pengujian sample di UPTD Puskesmas	sample	Jumlah pengujian sample Sumber : Permentan No 03 Thn 2019 Tentang PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	∞	200
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kepmen 050 2021	
		Terlaksananya Pembayaran Jasa Tindakan Medis Veteriner Terlaksananya Pengujian Sampel darah dan feses	Bulan	Jumlah Jasa Tindakan medis veteriner dan pengujian sample yang di bayar		
		Tersediannya Operasional DAK Non Fisik PUSKESWAN	Paket	Jumlah Operasional Puskesmas yang di Biayai (Paket)		
3.27.04.2.02	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>(1) Terlaksananya Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan di Pasar Ternak Sungai Sirah</b>	Ekor	Jumlah Pengeluaran Ternak yang di Jual di pasar ternak Ket : akumulasi ternak yang di jual dalam 1 thn Sumber : permentan No 114 Thn 2014 Tentang PEMOTONGAN HEWAN KURBAN	∞	108
3.27.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kepmen 050 2021	
		Terlaksananya Pengelolaan Pasar ternak Sungai Sirah	Unit	Jumlah Pasar ternak yang di kelola		
		Terlaksananya bimbingan teknis Pemasaran ternak	Kali	Terlaksananya bimbingan teknis peternakan		



		<b>(2) Persentase Ketersediaan Produk Asal Ternak yang ASUH di UPTD RPH</b>	%	Jumlah Ternak yang di potong di RPH (ekor) tahun n / Jumlah ternak yang di potong di TPH dan RPH X 100 %  Sumber : Permentan No 11 Tahun 2020 SERTIFIKASI Tentang NKV UNIT USAHA PRODUK HEWAN	0 - 100	70
3.27.04.2.02.01	Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kepmen 050 2021	
		(1)Terbitnya Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) tipe C Rumah Potong Hewan	Sertifikat	Jumlah sertifikat NKV		
		(2)Terlaksanya pengawasan terhadap Tempat Pemotongan Hewan(TPH)/ Masyarakat	Kali	Frekuensi PengawasanTPH/Masyarakat yang melakukan pemotongan di luar RPH		
		(3) Tercpainya Target PAD dari RPH	jt	Tercapainya Target PAD		
		<b>(2) Produksi Olahan Produk Peternakan</b>	<b>Ton</b>	jumlah jumlah Produksi Olahan Peternakan (ton)	∞	1.591
3.27.04.2.04	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	(1) Jenis Produk Olahan Peternakan (jenis)	Jenis	Jumlah Jenis Produk Olahan Peternakan (jenis)	∞	10
3.27.04.2.04.01	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kepmen 050 2021	
		(1) Memfasilitasi MOU Perjanjian dalam Pemasaran Produk	kali	Jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi		



		(2)Terlaksananya lomba agribisnis peternakan	Katagori	Jenis produk hasil Peternakan yang dilombakan		
		(3)terlaksananya Pembinaan pendampingan dan pelatihanPengolahan hasil Ternak	Kali	Frekuensi Kelompok Ternak / Pelaku Usaha yang dibina		
		(4)Terlaksananya Pemantauan Informasi Pasar produk Peternakan	kali	data / informasi yang di Laporkan (kali)		
		5) Memfasilitasi Kepengurusan Izin Usaha Unit Pengolahan Hasil Peternakan	Izin	Jumlah rekomendasi yang di terbitkan		
		(6)Terlaksananya Promosi/Bazar hasil Produksi peternakan	Jenis	Jumlah Produk olahan yang di promosikan (jenis		
		(2) Terkendalinya Keamanan Pangan Asal Hewan ( PAH) dan produk olahan asal Hewan	Kali	frekuensi Pembinaan Pangan asal Hewan Sumber : Permentan Nomor 03 Tahun 2019,	∞	36
3.27.04.2.04.02	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kepmen 050 2021	
		(1)Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif	Kali	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan yang di lakukan ( Kali )		
		(2)Terlaksananya Pengawasan Hewan Qurban danMenjelang Hari Raya idul fitri	Kec	Jumlah Lokasi yang dilakukan pengawasan (kecamatan)		
		(3)Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan Toko Obat Hewan/petshop	thn	Frekuensi Pengawasan Toko Obat/Petshop yang di pantau		
		(4)Terlaksananya Sosialisasi ASUH	1 kali	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi yang dilaksanakan		



		5) Terlaksannya Pembinaan Pelaku Usaha Peternakan (Ayam, Ikan dan Daging)	pedagang	Jumlah Pelaku Usaha Peternakan yang di bina		
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	%	Jumlah Produksi Thn n - jumlah produksi thn n-1 /jumlah produksi thn n-1 * 100 (%) Keterangan : Peningkatan Produksi Ikan Budidaya setiap tahunnya.(baik existing maupun baru) Sumber : PERMENDAGRI 18 Th 2020, PERMEN-KP No 49 Thn 2014 Tentang USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN	0 - 100	5,25
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tingkat Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (%)	%	jumlah kelompok pembudidaya yang di bina / Jumlah kelompok Pembudidaya X 100 % Ket : Jumlah POKDAKKAN yang terdaftar di kota sungai penuh Sumber : PERMENDAGRI 86 Th 2017	0 - 100	23,33
3.25.04.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepmen 050 2021	
		tersediannya Data dan Informasi Perikanan	Dokumen	Jumlah data dan Informasi yang di sediakan  Sumber : Permen-KP No 61 tahun 2020 Tentang SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepmen 050 2021	



		Tersediannya Prasarana Pembudidaya ikan : (1) Pembangunan Kantor BBI	Jenis	Jumlah Prasarana yang dibangun		
		Terlaksannya Pembangunan pos jaga	Paket	Jumlah Pos Jaga yang dibangun		
		Terlaksannya Peningkatan / Rehabilitasi Kolam	Paket	Jumlah Kolam yang di bangun		
		Tersediannya )Pembatas Kolam	Paket	Jumlah Pembatas Kolam yang di bangun		
		Terlaksannya Pembangunan Turap BBI	Paket	Jumlah Turap BBI yang di bangun		
		Terlaksannya Pembangunan Pagar UPTD BBI	Paket	Jumlah Pagar Uptd BBI yang di bangun		
		Tersedianya Alat dan Mesin pakan Perikanan	Paket	Jumlah Alat dan Mesin Pembuatan Pakan alami yang di butuhkan		
		Tersediannya Sarana dan prasarana bahan pakan pembuatan pakan Alternatif / Pakan Alami	Paket	Jumlah Sarpras Alat dan Bahan pembuatan pakan ikan yang di butuhkan		
		Tersedianya Dukungan Dana DAK Perikanan	Paket	Jumlah dana dari APBD II di sediakan untuk Dukungan DAK Perikanan		
		Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan	Paket	Jumlah prasarana yang di penuhi dari Dana DAK/ Total Kebutuhan prasarana X 100		
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Tersediannya Sarana Pembudidaya Ikan Kelompok penerima bantuan ( Usulan Masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD )	Paket	Jumlah Sarana Pembudidayaan ikan		



		Jumlah Total Produksi Perikananbudidaya(IKK Outcome)	%	Jumlah Produksi ikan budidaya (Ton) Ket : Jumlah Produksi Setiap Tahunnya Sumber : PERMENDAGRI 18 Thn 2020, PERMEN-KP No 49 Thn 2014 Tentang USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN	0 - 100	247,36
3.25.04.2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Tingkat Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (%)</b>	%	jumlah kelompok pembudidaya yang di bina / Jumlah kelompok Pembudidaya X 100 % Ket : Jumlah POKDAKKAN yang terdaftar di kota sungai penuh Sumber : PERMENDAGRI 86 Th 2017 PERMENDAGRI 18 Thn 2020	0 - 100	23,33
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kepmen 050 2021	
		(1)Terlaksananya Pembinaan budidaya Perikanan ( penyuluhan, Pelatihan dan Percontohan )	Kec	Jumlah Kelompok yang dibina		
		(2)Terlaksananya Penambahan jumlah kolam aktif	4	Jumlah Peningkatan kolam yang berproduksi (kolam)		
		(3)Tersedianya data potensi perikanan kota Sungai Penuh	Dokumen	Jumlah dokumen potensi perikanan (Dok)		
		(4) Fasilitasi Potensi Sumber Air untuk Budidaya Ikan	Kali	Frekuensi Pemantauan Potensi Sumber Air		
		(5) Fasilitasi Pembentukan Kampung Ikan	Unit	Jumlah Kampung Ikan yang di fasilitasi		
		(6) Terlaksananya Pembudidaya Milenial	Pelaku	Jumlah peningkatanPembudidaya Milenial (pelaku/thn)		



		(7) Terlaksannya Pendampingan kelompok yang memanfaatkan Magot Sebagai Pakan ikan	kelompok	Jumlah Kelompok Ternak yang memanfaatkan Magot Sebagai Pakan ikan		
3.25.04.2.04.06	Perencanaan dan pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya ikan di Darat	Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Laporan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kepmen 050 2021	
		Terlaksananya proses produksi benih ikan lele dan nila	ekor	Jumlah Produksi benih (ekor)		
		Terlaksannaya Pemeliharaan benih ikan	ribu ekor	Jumlah Benih ikan yang di pelihara		
		Terlaksannya Pemeliharaan Induk Ikan	Paket	Jumlah Indukan yang di pelihara		
		Tersediannya Pengadaan Indukan unggul dan Bersertifikat	Paket	Jumlah Indukan yang di adakan (paket)		
		Tersediannya Operasional UPTD Balai Benih Ikan	bulan	Jumlah Operasional UPTD BBI yang di Biayai		
3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	(1) Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	%	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Thn n - jumlah produksi thn n-1 /jumlah produksi thn n-1 * 100 (%)  Keterangan : Peningkatan produksi Perikanan hasil tangkapan setiap tahunnya.(baik existing maupun baru) Sumber : PERMENDAGRI 18 Thn 2020, PERMEN-KP No 58 Tahun 2020 Tentang USAHA PERIKANAN TANGKAP	0 - 100	5,25



3.25.03.2.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terlaksanannya Pengelolaan wilayah sungai dan genangan air	DAS	Jumlah wilayah sungai dan genangan air yang di kelola (DAS ) Sumber : Kajian Pemanfaatan Genangan Air pasca banjir di Kota Sungai Penuh	0 - 5	2
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kepmen 050 2021	
		Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	Paket	Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap (Paket)		
		(2) Jumlah Total Produksi Perikanan tangkap (IKK Outcome)	Ton	Jumlah Produksi Tangkapan ikan di Perairan	∞	506,05
3.25.03.2.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terlaksanannya Pengelolaan wilayah sungai dan genangan air	DAS	Jumlah wilayah sungai dan genangan air yang di kelola (DAS ) Sumber : Kajian Pemanfaatan Genangan Air pasca banjir di Kota Sungai Penuh		
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kepmen 050 2021	
		Tersedianya Benih Ikan untuk restocking	benih	Jumlah benih yang di restocking (benih)		
		Jumlah Kelompok yang dibina pada kelompok Usaha Bersama di wilayah Perairan Umum	Kelompok	Jumlah lubuk larangan yang di bina (kelompok)		



3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>(1) Angka Konsumsi Ikan</b>	Kg/kap/thn	AKI = A+B+C, Dimana A : Angka Konsumsi RT, B= Konsumsi Luar RT, C= Konsumsi tdk tercatat Ket : angka konsumsi Rumah Tangga sudah ditetapkan dari angka sensus nasional Sumber : PEREMNEDAGRI 17 Tahun 2021, KKP RI,	∞	35,90
3.25.06.2.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan (Jenis)	Jenis	Ket : Peningkatan Jumlah jenis Produk olahan yang di dapatkan dari pelaku usaha di kota sungai penuh	∞	8 Jenis
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepmen 050 2021	
		(1) Terlaksananya Bazar	Kali	Jumlah Bazar produk olahan yang di gelar		
		Terlaksananya Gemarikan	Kali	Frekuensi kampanye Gemarikan yang dilakukan		
		Terlaksananya kegiatan Promosi produk dan hasil olahan ikan	Jenis	Jumlah Hasil Olahan Ikan yang di promosikan		
		Terlaksananya Pameran,pekan harmoni,lomba masak,promosi hari nusantara,jambore	Kali	Frekuensi Pameran Hasil Olahan Ikan yang dilaksanakan		
3.25.06.2.03.02		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku usaha		
	Tersedianya Fasilitas Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelaku usaha yang di beri bantuan		



		<b>(2) Produksi Olahan Produk Perikanan</b>	Ton	Jumlah Hasil Olahan Ikan (ton) Ket : Akumulasi Total Produksi Olahan Ikan dari tahun ke tahun Sumber : PERMEN KKP No 5 Tahun 2021 Tentang USAHA PENGOLAHAN IKAN	∞	104
3.25.06.2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>(1) Persenase POKLATSAR pengolahan yang mengikuti Pelatihan</b>	%	Jumlah POKLATSAR pengolahan yang mengikuti Diklat / jumlah POKLATSAR Pengolahan X 100 % Ket : jumlah poklatsar pengolahan yang terdaftar Sumber : - PERMENDAGRI 18 Thn 2020, PERMEN-KP No 5 Tahun 2021 Tentang USAHA PENGOLAHAN IKAN - Hasil evaluasi SAKIP 2020	0-100	35
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kepmen 050 2021	
		(1) Terlaksananya Bimbingan teknis usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Kali	Jumlah Bimtek usaha pengolahan Hasil Perikanan (kali )		
		2) terlaksananya bimtek usaha Pengolahan hasil perikanan	Pelaku	Jumlah kelompok /Pelaku usaha perikanan yang mengikuti pelatihan		
		(3) Terlaksananya Pembinaan Rekomendasi perizinan	Izin	Jumlah izin usaha yang di rekomendasikan Ket :Jumlah izin usaha perikanan Sumber : Permendagri 18 Th 2020		
		(4) Terlaksananya Pembinaan kelompok POKLATSAR	Kelompok	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang di bina		



		Terlaksannya Pelatihan Kepada Kelompok POKLATSAR (Pengolahan dan Pemasar)	Pelaku	Jumlah POKLATSAR yang mengikuti Pelatihan(Pelaku)		
		Persentase Pelaksanaan Bimbingan teknis pengolahan pakan ikan	%	Jumlah Pembudidaya ikan yang mengikuti Diklat / jumlah pembudidaya ikan X 100 %	0-100	
		<b>(2) Terbitnya rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dan usaha hasil perikanan di bidang Perikanan</b>	Izin	Jumlah rekomendasi Usaha yang di Terbitkan Ket : Sertifikat kelayakan pengolahan Sumber : PERMEN-KP No 72 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	∞	2
		Terlaksannya Pembinaan Rekomendasi perizinan	Izin	Jumlah rekomendasi Perizinan yang di terbitkan		



TABEL DAN FORMULASI INDIKATOR SEBAGAI LAMPIRAN RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA SUNGAI PENUH

Lampiran II. Formula/Definisi Operasional dalam Perhitungan Target dan Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh

Kode	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formula dan Definisi Operasional	Keterangan	Target setiap tahun sebagai Acuan
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	$(\text{Jumlah Laporan yang disusun}) / (\text{Jumlah Laporan Yang harus terpenuhi dalam satu tahun}) \times 100$	0 - 100%	100%
3.27.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja SKPD	%	$(\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun}) / (\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dipenuhi dalam satu tahun}) \times 100$	0 - 100%	100%
3.27.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dalam Satu tahun		3 (disesuaikan)
3.27.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen RKA yang disusun dalam satu tahun		2 (disesuaikan)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dokumen	Jumlah terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dalam satu tahun		2 (disesuaikan)
3.27.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD (LKj-IP, LKPJ, LPPD, IKU, Cascading, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (LKj-IP, LKPJ, LPPD, IKU, Cascading, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan) yang disusun dalam satu tahun		3 (disesuaikan)



3.27.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD yang disusun dalam satu tahun		1 (disesuaikan)
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	%	<b>(Target layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah /Jumlah layanan administrasi keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang harus dipenuhi dalam satu tahun) x 100</b>	<b>0 - 100%</b>	<b>100%</b>
3.27.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Bakeuda Kota Sungai Penuh</b>	%	<b>(Jumlah layanan Administrasi Keuangan / Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang harus dipenuhi dalam satu tahun) x 100</b>	<b>0 - 100%</b>	<b>100%</b>
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam satu tahun		14 (disesuaikan)
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa tenaga penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun	Dokumen	Jumlah pembayaran jasa tenaga penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun		12 (disesuaikan)
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	Dokumen	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu		12 (disesuaikan)
		Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	Dokumen	Jumlah dokumen/ laporan keuangan yang dipenuhi		1 (disesuaikan)



		Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<b>Laporan</b>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun dalam satu tahun		<b>18 (disesuaikan)</b>
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum di SKPD</b>	<b>%</b>	<b>(Target layanan Administrasi Umum / Jumlah layanan Administrasi Umum yang Terpenuhi dalam satu tahun) x 100</b>	<b>0 - 100%</b>	<b>100%</b>
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor	<b>Macam</b>	Jumlah tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor yang terpenuhi dalam satu tahun		<b>(disesuaikan)</b>
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun	<b>Bidang</b>	Jumlah Bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun		<b>(disesuaikan)</b>
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	<b>Macam</b>	Jumlah tersedianya Peralatan Rumah Tangga dalam satu tahun		<b>(disesuaikan)</b>
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor Tersedianya Makan dan Minum	<b>Bulan</b>	Jumlah tersedianya Logistik Kantor, Makan dan Minum yang terpenuhi dalam satu tahun		<b>(disesuaikan)</b>
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	<b>Macam</b>	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang di penuhi dalam satu tahun		<b>(disesuaikan)</b>
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>Macam</b>	Jumlah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam satu tahun		<b>(disesuaikan)</b>
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	<b>Kali</b>	Jumlah terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dalam satu tahun		<b>(disesuaikan)</b>
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>(Target Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Realisasi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) x 100</b>	<b>0 - 100%</b>	<b>100%</b>
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	<b>SKPD</b>	Jumlah Alat Tulis Kantor yang di penuhi		<b>(disesuaikan)</b>



3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di setiap Bidang	Bulan	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di setiap Bidang dalam satu tahun		12 (d disesuaikan)
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bidang	Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam satu tahun		(d disesuaikan)
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pembayaran Honor Penjaga Kebersihan dan Keamanan Kantor dan Tersedianya Bahan dan Alat-alat Kebersihan	Bulan	Jumlah tersedianya Pembayaran Honor Penjaga Kebersihan dan Tersedianya Bahan dan Alat-alat Kebersihan dalam satu tahun		12 (d disesuaikan)
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah</b>	%	<b>(Target pengadaan pemeliharaan Barang Milik Daerah / Jumlah pengadaan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi dalam satu tahun) x 100</b>	<b>0 - 100%</b>	<b>100%</b>
3.27.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan Barang Milik Daerah di SKPD</b>	%	<b>(Target layanan Administrasi Keuangan / Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang harus dipenuhi dalam satu tahun) x 100</b>	<b>0 - 100%</b>	<b>100%</b>
3.27.01.2.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) - Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun - Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang direkonsiliasi dan disusun	%	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)		100 (d disesuaikan)



3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	(Target Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD / Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD) x 100	0 - 100%	100%
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Jumlah tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam satu tahun - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia dalam satu tahun		(disesuaikan)
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Paket, Dokumen	Jumlah Mebel yang tersedia dalam satu tahun		(disesuaikan)
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terciptanya Kondisi Kerja yang Baik dan Pelayanan yang Prima	unit	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi dalam satu tahun		(disesuaikan)
3.27.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Perlengkapan Kantor	Paket, Dokume	Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpenuhi dalam satu tahun		(disesuaikan)
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket, Dokume	Jumlah terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam satu tahun		(disesuaikan)
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian pemeliharaan barang Milik Daerah pada SKPD	%	(Target Ketercapaian pemeliharaan barang Milik Daerah pada SKPD) / ( Realisasi pemeliharaan barang Milik Daerah pada SKPD) x 100	0 - 100%	100%
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Terpeliharanya dan Terawatnya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas - Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Jumlah terpeliharanya dan Terawatnya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas yang dipenuhi dalam satu tahun Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam satu tahun		(disesuaikan)



3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Macam	Jumlah terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dalam satu tahun		(d disesuaikan)
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terciptanya Suasana Kerja yang Kondusif	Kali	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpenuhi dalam satu tahun		(d disesuaikan)
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah</b>	%	Persentase Capaian PAD / Target PAD Daerah x 100	0 - 100	
3.27.01.2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Peternakan dan Perikanan</b>	%	Persentase Capaian PAD / Target PAD Daerah x 100		100
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Dearah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Peternakan dan Perikanan	%	Persentase Capaian PAD / Target PAD Daerah x 100		100
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Persentase aparatur yang berkinerja baik</b>	%	<b>(Target aparatur yang berkinerja baik) / (Jumlah aparatur berkinerja baik dalam satu tahun) x 100</b>	<b>0 - 100%</b>	<b>100%</b>
3.27.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur yang berkinerja baik</b>	%	<b>(Target aparatur yang berkinerja baik) / (Jumlah aparatur berkinerja baik dalam satu tahun) x 100</b>	<b>0 - 100%</b>	<b>100%</b>
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapannya	Stel	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dalam satu tahun		(d disesuaikan)



3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	%	Persentase meningkatnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun dalam satu tahun		(d disesuaikan)
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	%	Persentase terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		(d disesuaikan)
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi dan Bimtek</b>	%	<b>(Target aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi dan Bimtek) / (Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi dan Bimtek dalam satu tahun) x 100</b>	<b>0 - 100%</b>	<b>100%</b>
3.27.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi dan Bimtek</b>	%	<b>(Target aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi dan Bimtek) / (Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi dan Bimtek dalam satu tahun) x 100</b>	<b>0 - 100%</b>	<b>100%</b>
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	<b>Aparatur</b>	Jumlah Aparatur mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dalam satu tahun		(d disesuaikan)



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh tahun 2027 berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis merupakan panduan bagi Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh agar mendukung pencapaian target-target Dinas Peternakan Dan Perikanan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
4. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan,



maka Penyusunan Renja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh wajib berpedoman pada RPJMD Kota Sungai Penuh.

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh, dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 disusun sebagai penjabaran RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran RPJMD dalam dokumen Renstra Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN KOTA SUNGAI PENUH**



**EDI JUARSA, S.Pt, M.Si**  
Pembina TK I

NIP.19690417 200502 1 004